

TUGAS AKHIR

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
HARIAN/DELI
TGL. TERIMA : 12 FEBRUARI 2006
NO. JUDUL : 00 512 170
NO. BKV. : 512 170 0055 001

RELOKASI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI SERAGEN

Penekanan pada citra bangunan Post-Modern pada penampilan bangunan



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Disusun Oleh :

JOKO SUSILO

No. Mhs : 00 512 170

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
JURUSAN ARSITEKTUR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006



TUGAS AKHIR
RELOKASI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DI SRAGEN

Penekanan pada citra bangunan Post-Modern pada penampilan bangunan



DISUSUN OLEH

JOKO SUSILO

NO.Mhs : 00512170

Dosen Pembimbing

Ir. Supriyanta, Msi

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA

2005

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
RELOKASI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DI SRAGEN

Penekanan pada citra bangunan Post-Modern pada penampilan bangunan

Disusun oleh :

Joko Susilo

No. Mahasiswa 00 512 170

Jogjakarta, Januari 2006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



(Ir. Supriyanta, MSi)

Mengetahui

Ketua Jurusan Arsitektur FTSP

Universitas Islam Indonesia



(Ir. Reviyanto Budi Santoso, M.Arch)

Teman-teman Seperjuangan

Sigit ojo wira wiri wae, pikunnya dipelihara, hpnya besok dikasih rantai ya biar gak ilang, gmn kelanjutannya si "itu" maju terus pantang mundur,
Yuan mksh tuk monitornya walaupun harus pakai senter (gelap Je), jangan tebar pesona terus, kenalin dong TTMnya he5x, akhirnya kita lulus juga he..he..he...
Totok&Menik tanks tuk informasinya&hardisknya tanpa itu semua aku gak bisa ngerjain, kapan undangannya?
Om Bazir gmn program dietnya???, **Gembel** mksh tuk sewaan mobilnya, **Mas Didit** ra mbojo wae, kerja sing bener, **Mas Kaning, Topan, Kumis, Andi Wiryo** memorinya masih tak bawa ya, kuliah yang bener biar cepet nyusul aku.
Sangaji, Bondan, Nuning syukurannya kapan nich???
Agus, Dwi, Indra, Sinta, Yudi semoga kita bisa ketemu lagi
Ayang cs jangan bikin keributan di studio ya!!
Mas Tutut& Mas Sarjiman makasih tuk bantuannya and tolong jaga studio baik2 ya...he..he..he..
For Kirana's family
Ibu Ismardiati makasih tuk doa restunya, terima kasih tuk semuanya maaf gak bisa disebutkan satu persatu pokoknya matur nuwun.
AD 5199 DN makasih telah menemaniku kemanapun aku pergi, sori kadang aku lupa ngrawat kamu...
Komputer&Printerku tanpamu aku gak bisa lulus...
All Family of architecture'2000 :
Joned gek ndang lulus, cukur dab wis tuwo
Oyik wah hbs TA sugih duwit, laris tuk maketnya...
Rudiansyah kalau ke kampus mandi dulu kasihan tmn2nya
Doni (Bang Roma) kapan konsernya tak tunggu
Yuda habis TA jadi developer nich jgn lupa ma aku ya
Tanks tuk semuanya sori gak bisa disebutin semua

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya serta shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat rahmat Allah pula sehingga pada saat ini saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul RELOKASI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI SRAGEN.

Tugas akhir ini merupakan prasyarat untuk memperoleh predikat keserjanaan Strata 1 dari Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

Selama pelaksanaan Hingga tersusunnya laporan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta pengarahan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan yang baik ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Ir. Supriyanta, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Ir. Priyo Pratikno, MT selaku Dosen Penguji.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih kurang dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan dan semoga laporan ini dapat berguna serta membawa manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, Januari 2006

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi.....	viii
Bab I PROPOSAL.....	1
1. Pengertian Judul.....	1
2. Latar Belakang.....	1
2.1. Fenomena.....	1
2.2. Gedung DPRD.....	2
2.3. Gedung DPRD Tingkat II Sragen.....	2
2.4. Ekspresi dan Identitas Wilayah Sebagai Latar Belakang Arsitektural.....	4
2.5. Citra dan Identitas ke dalam Bangunan Gedung DPRD Sragen.....	4
2.6. Permasalahan.....	7
2.7. Tujuan dan Sasaran.....	7
2.8. Batasan dan Lingkup Pembahasan.....	7
2.9. Metode Pengambilan Data.....	8
2.10. Metode Pembahasan.....	9
2.11. Keaslian Penulisan.....	9
3. Spesifikasi Proyek.....	10
3.1. Dasar Pertimbangan Pemilihan Tapak.....	10
3.2. Lokasi.....	11
3.3. Luas Site.....	11
3.4. Batas-batas Site.....	12
3.5. View dari Site.....	12

4. Tinjauan Studi Bangunan Gedung DPR.....	13
4.1. Guna.....	13
4.2. Kegiatan Pada Gedung DPRD.....	15
4.3. Kebutuhan Ruang pada Gedung DPRD.....	18
4.4. Analisa Kegiatan Pelaku.....	19
4.5. Analisa Besaran Ruang.....	21
5. Tinjauan Gedung DPRD Sragen.....	23
5.1. Struktur dan Unsur Pelaku dalam Gedung DPRD Sragen...	23
6. Tinjauan Ekspresi Bangunan.....	25
6.1. Aspek Guna dan Citra.....	25
6.2. Ekspresi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan.....	25
6.3. Penampilan pada Gedung DPRD.....	28
7. Arsitektur Post-Modern.....	31
7.1. Arsitektur Post-Modern.....	31
7.2. Bangunan Arsitektur Post-Modern.....	32
 BAB II SKEMATIK DESAIN.....	 33
 BAB III LAPORAN PERANCANGAN.....	 44
 DAFTAR PUSTAKA.....	 ix
 LAMPIRAN.....	 x

ABSTRAK

Otonomi daerah yang belum lama ini di terapkan di Negara Indonesia banyak membawa dampak di berbagai aspek. Salah satu dampak positifnya adalah dengan di berlakukannya Otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi menjadi lebih leluasa untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintahan dari anggota Dewan Legislatif dalam bentuk bangunan. Aktifitas kegiatan tersebut meliputi kelembagaan eksekutif dengan masyarakat, yang menampung segala bentuk aspirasi yang datang dari masyarakat yang berpengaruh terhadap tugas dari anggota tersebut

Penekanan pada bangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Sragen ini adalah citra bangunan Post-Moden pada penampilan bangunan. Sebauah banguna tidak hanya merespon fungsi yang ada didalamnya tetapi juga merespon budaya dimana bangunan tersebut akan berdiri.

Permasalahan yang diangkat secara umum adalah bagaimana merencanakan dan merancang bangunan yang berfungsi sebagai kantor DPRD Sragen di kawasan yang baru di area pusat dari pemerintahan.

Lingkup pembahasan yang diambil adalah pembahasan mengenai aspek-aspek pembentuk penampilan bangunan dengan kesan Post-Modern sebagai faktor penentu.

Metode pembahasan yang digunakan yaitu : Survei Lapangan, mempelajari bangunan tradisional Jawa dan bangunan Postmodern yang dikaitkan dengan pemaknaan pada bentuk, ruang dan penampilanya. mempelajari pemaknaan kesan dan citra pada bangunan.

Metode pembahasan yaitu : Diskriptif, dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang berkaitan dengan latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan topik. Analisis bentuk bangunan DPR, analisa lokasi, analisa kebutuhan dan kebesaran ruang, serta tuntutan ruang baru, analisa arsitektural dalam kaitanya dengan penentuan penampilan bangunan gedung DPRD di Sragen, kesimpulan dari hasil analisa sebagai pendekatan konsep dalam perencanaan dan perancangan.

RELOKASI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI SRAGEN

Penekanan pada citra bangunan Post-Modern pada penampilan bangunan

1. PENGERTIAN JUDUL

- Gedung : Bangunan yang mewadahi aktifitas tertentu
- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Suatu lembaga pemerintahan dari anggota legislatif

(sumber : Kamus Umum Bahasa Indonesia)

adalah : wadah aktifitas lembaga pemerintahan dari anggota dewan legislatif dalam bentuk bangunan.

2. LATAR BELAKANG

2.1 Fenomena

Otonomi daerah yang belum lama ini di terapkan di Negara Indonesia banyak membawa dampak di berbagai aspek. Salah satu dampak positifnya adalah dengan di berlakukannya Otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi menjadi lebih leluasa untuk mengatur daerahnya masing-masing. Namun kebebasan itu bukan berarti bebas sebebaskan-bebasnya, tetapi ada aturan-aturan yang harus di taati, yang datangnya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan daerahnya.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mempunyai program untuk dijalankan guna mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya. Program ini dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap, disesuaikan dengan tingkat pendapatan perkapita daerah itu sendiri. Program-program yang dicanangkan harus mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah pusat membawahi pemerintah-pemerintah Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh seorang gubernur. Daerah Tingkat I terdiri dari Daerah Istimewa dan Propinsi. Daerah tingkat I membawahi beberapa Daerah Tingkat II atau Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Pemerintah Daerah Tingkat II atau Kabupaten, mempunyai wewenang untuk menyampaikan aspirasi yang datangnya dari masyarakat kepada pemerintah Daerah Tingkat I maupun ke pemerintahan pusat. Untuk menampung aspirasi yang datangnya dari masyarakat diperlukan suatu wadah. Dalam hal ini yang mewadahi aspirasi rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

2.2 Gedung DPRD

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintahan dari anggota Dewan Legislatif dalam bentuk bangunan. Aktifitas kegiatan tersebut meliputi kelembagaan eksekutif dengan masyarakat, yang menampung segala bentuk aspirasi yang datang dari masyarakat yang berpengaruh terhadap tugas dari anggota tersebut. Kedua, adalah hubungan antara DPR dengan pemerintah, DPR bersama-sama dengan masyarakat mempunyai wewenang untuk mengontrol pemerintah. Dalam hal ini menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

2.3 Gedung DPRD Tingkat II Sragen

Gedung DPRD Tingkat II Sragen terletak di Jalan Raya Sukowati KM 4 bersebrangan dengan alun-alun kota Sragen. Dalam perkembangannya gedung tersebut dinilai tidak representatif lagi dan tidak mewakili status gedung tersebut sebagai wadah anggota dewan legislatif. ketidak sesuaian tersebut dipengaruhi oleh :

a. Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Anggota Dewan

Masyarakat sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pelaksanaan agenda kerja dewan legislatif mempunyai pengaruh besar terhadap sistem tata pemerintahan. Masyarakat berfungsi sebagai kontrol dari jalannya

pemerintahan yang secara sistematis diwakili oleh kewenangan anggota DPR. Peran masyarakat dalam pemerintahan yang diwakili oleh anggota DPR memerlukan sebuah wadah yang mewakili aspirasi rakyat. Kebutuhan akan ruang yang mewadahi peran masyarakat dalam pemerintahan perlu mendapat perhatian, misalnya perlunya ruang yang mewadahi aktifitas yang melibatkan langsung masyarakat.

Gedung tersebut dinilai kurang representatif karena letaknya yang berjauhan dengan gedung-gedung pemerintahan yang lain sebagai sarana pelayanan masyarakat, walaupun gedung DPRD Tingkat II Sragen berada di pusat kota.

b. Ketidak Sesuaian antara Kebutuhan dan Kapasitas Ruang

Perubahan sistem kerja di Gedung DPRD Sragen merupakan fungsi yang harus direspon dengan wadah yang dapat mendukung aktifitas kegiatan didalamnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab Gedung DPRD Sragen tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atas kegiatan dan aktifitas dewan ditinjau dari kebutuhan dan kapasitas ruang. Respon pada terciptanya ruang yang sesuai aktifitas kegiatan dan ruang gerak pengguna merupakan jawaban dari kebutuhan akan wadah Gedung DPRD Sragen yang baru. Keterbatasan ruang staff yang terbagi atas tiga ruang dengan luas total 56m² untuk menampung aktifitas 40 orang, keterbatasan ruang sidang, hall, ruang fraksi, ruang pers, dan sebagainya merupakan fungsi yang harus dibenahi.

c. Peraturan Pemerintah Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2004, Tentang "Perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten daerah tingkat II Sragen". Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 di jadikan pedoman dalam mengatur tata ruang wilayah kabupaten. Sehingga pemanfaatan ruang dapat optimal, serasi, seimbang terpadu, dan tertib. Perkembangan keadaan yang relatif cepat yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pergeseran paradigma dalam pembangunan telah mempengaruhi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.

2.4 Ekspresi dan Identitas Wilayah Sebagai Latar Belakang Arsitektural

Dalam merencanakan bangunan gedung DPRD Sragen diperlukan pengungkapan suatu gambaran untuk mewujudkan tampilan bangunan agar dapat dimengerti pesan-pesan dan makna yang akan disampaikan. Gambaran tersebut hendaklah berupa cerminan dari latar belakang yang didasari pada fungsi, peran bangunan terhadap pemakai, dan lingkungan. Bangunan yang diakui sebagai arsitektur yang bagus adalah bangunan yang memuat sejumlah komunikasi kedalam totalitas dan mengekspresikannya secara ringkas, tepat, dan indah. (*Frederik A. Jules, 1994*)

Perencanaan dan perancangan bangunan tidak hanya berupa pengungkapan ekspresi saja, tapi juga diperlukan suatu unsur yang dapat memberikan jati diri dan identitas terhadap bangunan agar penggunaan ekspresi tidak merusak citra bangunan dan lingkungan sekitar. Eko Budiarjo berpendapat bahwa identitas itu tidak sekedar perlu tetapi sangat dibutuhkan sebagai pegangan handal bagi setiap perencanaan bangunan, (*Eko Budiarjo, 1987*) hal tersebut menegaskan bahwa suatu rancangan bangunan juga harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar termasuk bangunan.

2.5 Citra dan Identitas ke dalam Bangunan Gedung DPRD Sragen

a. Citra

Pengertian citra sebenarnya menunjuk suatu gambaran (image), suatu kesan penghayatan yang menangkap arti bagi seseorang. Citra bangunan terhadap kota menurut Kevin Lynch (1960) dapat diperoleh melalui tiga faktor

- Identity (identitas), sebuah objek memiliki ciri kepribadian (individuality)
- Structure (struktur), adalah hubungan ruang antar unsur-unsur dalam kota.
- Meaning (arti), makna dari unsur-unsur secara spasial dan struktural.

Identitas, struktur, dan arti tersebut masing-masing saling terkait membentuk citra. Ungkapan citra kedalam bangunan gedung DPRD Sragen merupakan hal utama dari seluruh proses perencanaan dan perancangan. Sedangkan citra yang diwujudkan dalam gedung DPRD Sragen ini adalah menampilkan citra bangunan tradisional Jawa yang dipadukan dengan unsur modern dalam hal ini aliran post modern.

Perkembangan jaman yang semakin modern menuntut kita untuk berpikir modern juga. Seiring dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya pada material bangunan, pemikiran sebuah perancangan harus melihat hal tersebut sebagai sebuah tantangan untuk merancang dengan menggunakan bahan-bahan baru menggantikan material lama. Dalam hal ini ada sebuah aliran yang mempunyai pemikiran tersebut yaitu aliran Postmodern. Aliran ini mempunyai pemikiran bahwa arsitektur sebagai cabang kesenian yang memiliki otonomi nilai simbolik dan estetika komukatif. (Bagoes Poernomo. W., 1993) Aliran ini lebih mencerminkan realitas sosial yang *exploratif* dan eksperimentalisme yang bertumpu pada kapitalis demokratis. Aliran ini tidak semata-mata menampilkan sosok baru, namun penampilan sosok yang baru ini tidak lepas dari kebudayaan daerah setempat.

Post Modern merupakan revisi dari aliran Modern yang berkembang pada abad 19 dan awal abad ke 20. gerakan ini lahir setelah terjadinya revolusi industri, gerakan ini berkembang pesat di Jerman. Aliran Modern direvisi oleh Post-Modern karena setelah Perang Dunia II, arsitektur modern di Jerman dituduh sebagai biang keladi yang bertanggung jawab atas kualitas kota-kota yang monoton yang menghasilkan anonimitas. Dengan penampilan bangunan kotak-kotak kaca yang tidak berwajah dinilai tidak memiliki jati diri atau identitas (tidak memiliki kepribadian). Bila tidak diberi label papan nama atau tanda-tanda tertentu, tidak ada yang bisa menebak fungsi dan aktifitas yang berlangsung didalamnya. Bisa kantor, bisa hotel, bisa pula penjara. Dalam lingkungan yang berwajah tunggal rupa itu, orang lantas kebingungan dan kehilangan orientasi. Gerakan modern menganut kaidah "*Ornamen is*

crime , “*Less is more*”, dan “*Form follow function*” karena aliran ini anti terhadap sejarah, bahwasanya sejarah adalah masa lalu, sedangkan kita hidup di jaman sekarang buat apa megagung-agungkan dan mengagumi sejarah yang sudah berlalu. Post-Modern dalam arsitektur dan perancangan urban seringkali dikaitkan dengan kembalinya gerakan historismus. Gerakan ini yang mereparasi wajah dan kualitas ruang kota. Post-Modern mempunyai kecenderungan untuk mengembalikan arsitektur sebagai seni yang memiliki otonomi sejarah, dengan konteks baru “*Bentuk mengikuti budaya*”. Jadi bentuk tidak sepenuhnya mengikuti fungsi yang ada didalamnya tetapi juga mengangkat budaya dimana bangunan tersebut berdiri. Tokoh-tokoh yang berada dibalik gerakan ini antara lain Chales Jencks, seorang kritisi sejarah arsitektur, Lyotard, dalam dunia Barat dia semacam Nabi Post-Modernism, Robert Venturi yang merespon konteks Mies Van De Roeh “*Less Is More*” dengan “*Less Is Bore*” . Dalam kaitanya dengan gedung DPRD Sragen aliran Postmodern sebagai citra dari bangunan yang modern dengan tidak meninggalkan budaya daerah, dalam hal ini arsitektur Jawa.

b. Identitas

Arsitektur tradisional Jawa harus dilihat dari totalitas pernyataan hidup yang bertolak dari tata krama menempatkan diri, norma dan tata nilai Jawa dengan segala kondisi alam dan lingkungannya. (Budiarjo, Eko, 1987) penggalian dan pengungkapan esensi yang menjiwai bangunan tersebut dimaksudkan agar kita tidak terperangkap pada bentuk fisik dan luarnya saja, sehingga perwujudan identitas wilayah akan bersifat lebih luas tidak hanya simbolik saja. Beberapa esensi arsitektur Jawa yang sering digunakan adalah tata krama menempatkan diri, arsitektur sebagai proses organik, kejujuran struktur dan bahan, ruang dalam dan ruag luar yang saling mengimbas dan sebagainya. (Budiarjo Eko, 1987) contoh tersebut merupakan esensi yang dapat diterapkan dalam pengolahan citra bangunan sebagai identitas daerah.

2.6 Permasalahan

a. permasalahan Umum

- Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan yang berfungsi sebagai kantor DPRD Sragen di kawasan yang baru di area pusat dari pemerintahan.

b. Permasalahan Khusus

- Bagaimana mewujudkan penampilan bangunan gedung DPRD Sragen yang baru dengan mengekspresikan bangunan Post-Modern.

2.7 Tujuan Sasaran

a. Tujuan.

- Merancang bangunan yang berfungsi sebagai Gedung DPRD Sragen yang menampilkan bangunan Post-modern kedalam fungsi dan estetika bangunan.

b. Sasaran

- Identifikasi antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Post-Modern terhadap bangunan.
- Identifikasi besaran ruang dan organisasi ruang terhadap kegiatan
- Identifikasi sirkulasi dan fasilitas servis terhadap besaran ruang.

2.8 Batasan Dan Lingkup Pembahasan

1. Batasan

Pembahasan dibatasi pada masalah pengolahan sistem tata ruang dan penampilan bangunan yang mampu mengekspresikan kesan komunikatif pada fasad dan masa bangunan terhadap citra bangunan Post-Modern.

2. Lingkup Pembahasan

a. Lingkup Non-arsitektural

Makna keterbukaan dan kewibawaan pada bangunan tradisional Jawa, yaitu bagaimana penilaian menurut orang Jawa didasarkan pada bentuk ruang dan penampilan terhadap bangunan tradisional Jawa.

b. Lingkup Arsitektural

Pembahasan mengenai aspek-aspek pembentuk penampilan bangunan dengan kesan Post-Modern dan arsitektur Jawa sebagai faktor penentu :

- Pembahasan mengenai penampilan fisik bangunan dengan pendekatan pada kesan arsitektur Jawa. Yaitu bagaimana menampilkan bentuk bangunan yang dapat menggambarkan kesan arsitektur Post-Modern dengan perwujudan fungsi dan perpaduan elemen bangunan.
- Elemen-elemen penyusun dan sistem peruangan yang sesuai dengan bangunan tradisional setempat.
Yaitu bagaimana karakter bangunan tradisional yang sesuai dengan budaya masyarakat Sragen dapat disesuaikan dengan bangunan baru.

2.9 Metode Pengambilan Data

a. Studi Literatur

- Mempelajari pengertian dan fungsi bangunan pemerintahan gedung DPR, fasilitas yang diwadahi dan tuntutan ruang.
- Mempelajari pengertian penampilan bangunan.

b. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan mencari data secara langsung melalui :

- Pengamatan langsung pada kondisi lokasi, tapak, dan lingkungan sekitar.
- Wawancara.

c. Mempelajari pemaknaan kesan dan citra pada bangunan

d. Mempelajari bangunan tradisional Jawa dan bangunan Postmodern yang dikaitkan dengan pemaknaan pada bentuk, ruang dan penampilanya.

2.10 Metode Pembahasan

a. Deskriptif

Dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang berkaitan dengan latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan topik.

b. Analisis

Analisis dilakukan dengan tiga tahap :

- Analisa bentuk bangunan DPR, analisa lokasi, analisa kebutuhan dan kebesaran ruang, serta tuntutan ruang baru.
- Analisa arsitektural dalam kaitanya dengan penentuan penampakan bangunan gedung DPR dengan pendekatan pada kewibawaan sebagai cerminan arsitektur Post-Modern dan budaya arsitektur Jawa.
- Kesimpulan dari hasil analisa sebagai pendekatan konsep dalam perencanaan dan perancangan.

2.11 Keaslian Penulisan

1. Erny Susandah, TA/UII/1994

KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II MUSI BANYU ASIN SALAYU
SUMSEL

Landasan Konseptual Perancangan

2. Samsul Ma'arif, TA/UII/1996

KANTOR KABUPATEN DEARAH TEGAL

Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan

3. Muhammad Nur Hidayat, TA/UII/1996

KANTOR KABUPATEN DAERAH TEMANGGUNG

Sebagai Wadah Penyelenggara Otonomi Daerah Dengan Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan

4. Joko Susanto, TA/UII/2000

GEDUNG BALAI KOTA DI KOTA ADMINISTRATIF TANJUNG

Dengan Pendekatan Desain Bioklimat

5. Resyy Herpani, TA/UII/2000

RELOKASI KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH
TINGGKAT II SUKABUMI

*Optimalisasi dan Keterpaduan Pelayanan Sebagai Perwujudan Otonomi
Daerah*

Kesimpulan :

Perbedaan pada penulisan diatas dengan penulisan yang akan dilakukan adalah pada jenis bangunan atau fungsi bangunan dan penekanan atau pokok permasalahan yaitu, pada penulisan yang akan diangkat adalah bangunan yang berfungsi sebagai gedung DPR dan *Penekanan pada citra bangunan Post-Modern sebagai konsep perancangan.*

3 SPESIFIKASI PROYEK

3.1 Dasar Pertimbangan Pemilihan Tapak

Beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tapak antara lain :

- a. Dekat dengan fasilitas yang mendukung kegiatan Kantor DPRD (pertokoan, kantor pos, kantor polisi, bank, rumah sakit/poliklinik, dll).(*Time Saver standard for Buildings, hal 492*)
- b. Tapak mempunyai aksesibilitas mendukung, terletak srategis dan mendukung kemudahan pengenalan.(*Time Saver Standard for Buildings, hal 492*)
- c. Kondisi tanah tapak mempunyai luasan yang memadai sesuai dengan kebutuhan, topografi datar sehingga memudahkan pekerjaan konstruksi.(*Joseph deChaira, Standar Perencanaan Tapak, hal 97-100*)
- d. Disekitar tapak terdapat jalan yang dapat dipergunakan sebagai pintu keluar masuk tapak, sehingga pencapaian ke tapak mudah dan aman tanpa terganggu lalu lintas di sekitarnya.(*Joseph deChaira, standar Perencanaan Tapak, hal 97-100*)

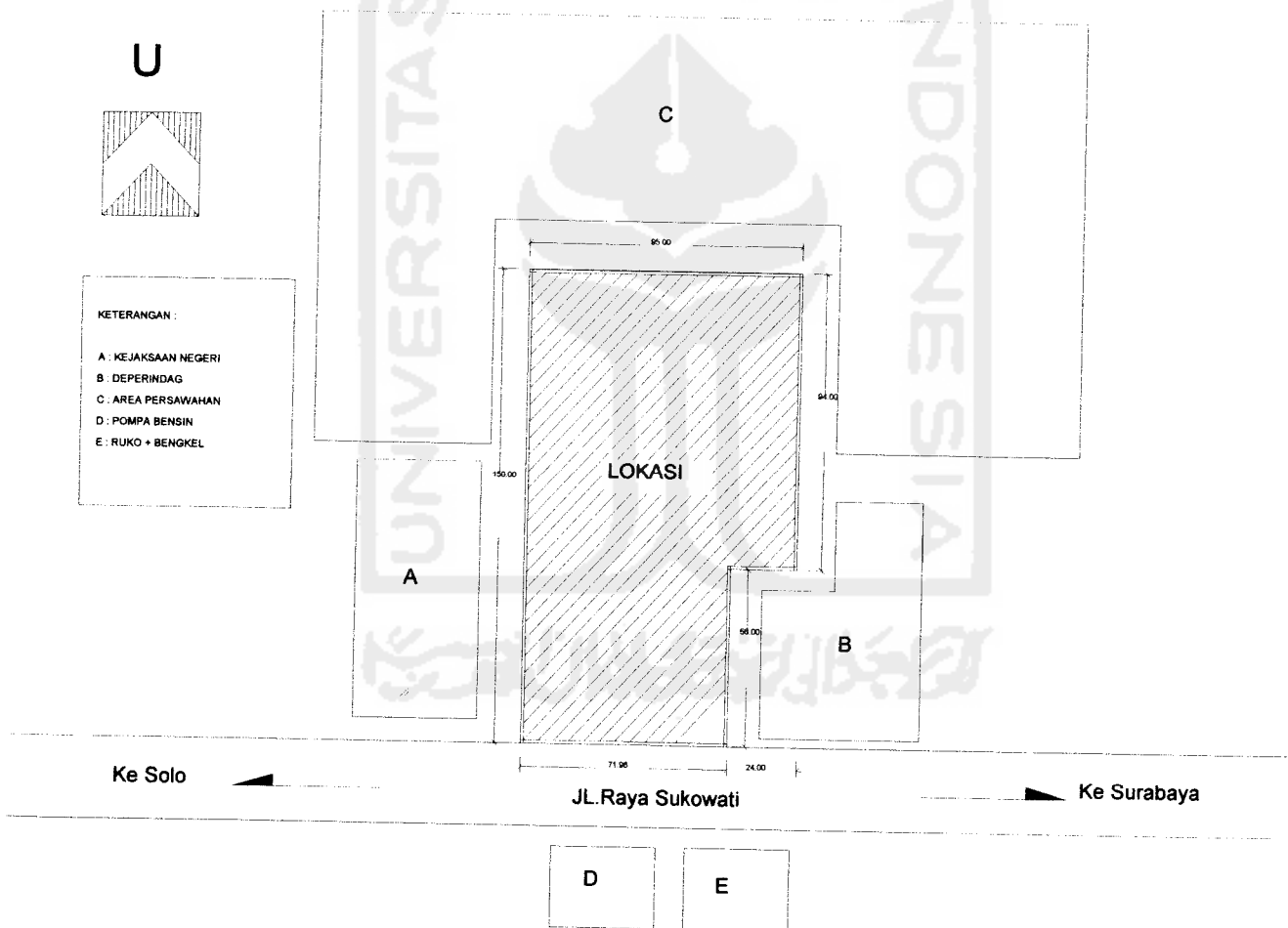
3.2 Lokasi

Lokasi site berada di Kabupaten Sragen, tepatnya Jl. Raya Sukowati KM 1 yang merupakan daerah pengembangan sebagai pusat pemerintahan Kota Sragen.

Site terpilih merupakan area pengembangan untuk kawasan perkantoran dan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sragen. Lokasi terpilih terletak di daerah strategis, fasilitas lingkungan mendukung, serta kemudahan pencapaian ke tapak.

3.3 Luas Site

Luas site yang digunakan $\pm 12.600 \text{ m}^2$

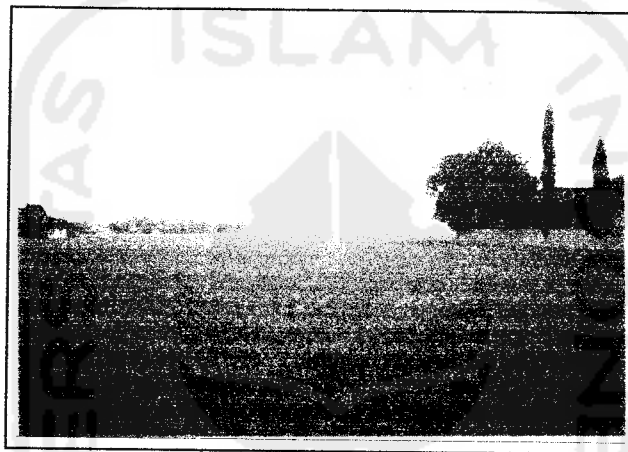


3.4 Batas-batas Site

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan area persawahan
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sukowati
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan area persawahan dan gedung Departemen Prindustrian Dan Perdagangan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan gedung Kejaksaan Negeri

3.5 View dari Site

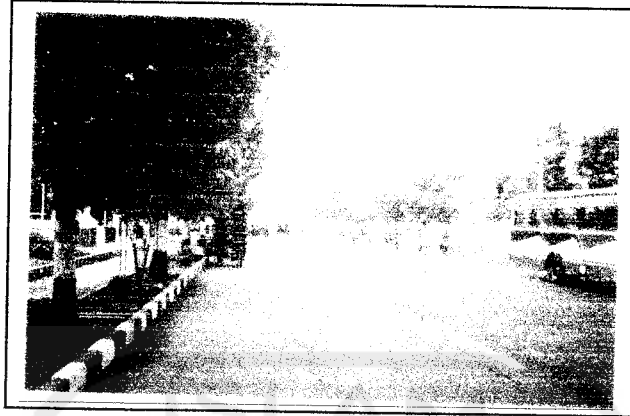
- a. Utara, view yang terlihat hanyalah persawahan dan rumah penduduk.



- b. Selatan, view kearah Jl. Raya Sukowati.



- c. Timur, view kearah gedung Depatemen Perindustrian Dan Perdagangan, dan area persawahan.



- d. Barat, view kearah area persawahan dan gedubg Kejaksaan Negeri.

4 Tinjauan Studi Bangunan Gedung DPR

4.1 Guna

Pengertian guna dalam Wastu Citra oleh Y.B. Mangunwijaya, adalah bahwa perkataan guna lebih menunjuk pada keuntungan, pemanfaatan (use, bahasa Inggris) yang diperoleh. Y.B. Mangunwijaya merumuskan tiga hal pokok yang dapat mempengaruhi guna, yaitu :

- Tata ruang.
- Pengaturan fisik yang tepat dan efisien.
- Kenyamanan (comfort, bahasa Inggris)

Guna dalam arti kata aslinya tidak hanya berarti bermanfaat, untung material belaka, tetapi lebih dari itu guna mempunyai daya yang menyebabkan kita bisa hidup lebih meningkat.

Dalam kaitanya dengan guna, maka Gedung DPRD Sragen berfungsi (berguna) sebagai bangunan pemerintah berupa kantor yang mewadahi aktivitas kegiatan sosial budaya masyarakat dan mempunyai tugas menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah sekaligus sebagai kontrol dari pemerintah daerah. Dari fungsi tersebut, maka

membutuhkan spesifikasi guna dan teknis sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan khusus untuk mendukung fungsi dan tujuannya. Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan teknis, meliputi :

- Standart ruang
- Kebutuhan ruang
- Hubungan antar ruang

Dalam hubungannya dengan susunan ruang dan tindakan pengguna, terdapat dua cara untuk menyatakan suatu setting ruang : *secara positif dengan mengartikulasikan pusatnya, dan secara negatif dengan mendefinisikan batasnya.*

a. Pusat

Pusat adalah posisi yang relatif. Suatu objek akan menjadi pusat jika melalui tindakan penghuninya, ia dianggap sebagai hal yang penting, dan lebih dari sekedar berada di tengah-tengah ruang atau memiliki bentuk yang secara mencolok berbeda. Pusat dalam suatu ruang akan menjadi orientasi. Pusat merupakan sesuatu yang memiliki daya untuk menarik, mengorientasikan dan memberi rasa 'berbeda didalam'.
(*Revianto B. Santoso – Omah 2000*)

b. Batas

Batas atau tepian suatu ruang dapat berwujud elemen fisik, dapat pula berupa suatu yang relatif bersifat nonfisik. Pembatas fisik dengan berbagai derajat ketertembusannya, tidak harus berupa dinding pejal. Pembatas dapat terwujud melalui peninggian lantai, jajaran kolom, atau dengan derajat terang yang kontras. Sedangkan pembatas non fisik dapat mengambil bentuk bentuknya ke dalam suatu regulasi atau aturan, melalui mekanisme kontrol, berupa aturan masuk kedalam ruang yang berlaku secara berbeda terhadap orang yang berbeda. (*Revianto B. Santoso- Omah: 2000*)

Transformasi batas pada gedung DPRD sebagai bangunan publik (*publik building*) selain sebagai pembatas fisik melalui penurunan lantai, peninggian lantai dan peletakan jajaran kolom dan dinding (baik pada

fungsi kantor dan fungsi publik). Sekaligus juga berfungsi sebagai fungsi kontrol (*sistem kendali massa*), sehingga kejelasan batas secara fungsional atas derajat ketertembusan yang dapat memungkinkan masyarakat (massa) masuk, berkumpul baik secara komunal maupun individual dapat tercapai.

4.2 Kegiatan Pada Gedung DPRD

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan gedung DPRD Sragen meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, privat, dan kegiatan servis yang dikelompokkan dalam dua badan tugas anatar lain :

1. Kegiatan yang bersifat publik

Kegiatan utama anggota DPRD meliputi kegiatan yang bersifat publik atau kegiatan umum yang berhubungan dengan unsur masyarakat, pemerintah atau badan lain seperti ;

a. Pelayanan pada kegiatan demonstrasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja yang bersifat berkala dengan jenjang waktu tidak pasti, dalam hal ini pelaku utama dari unsur masyarakat yang dilayani oleh anggota Dewan Legislatif yang merupakan kegiatan penyampaian pendoat atau protes yang dsampaikan oleh kelompok tertentu dari masyarakat.

Karakter dari kegiatan ini bersifat publik/umum sehingga dalam perancangan ruang hendaklah mempertimbangkan kualitas dan kuantitas ruang sebagai wadah aktifitas berupa **Hall dan ruang penyampaian pendapat**, dengan pencapaian yang mudah dan jelas.

b. Sidang Paripurna

Kegiatan ini merupakan aktifitas yang bersifat rutin-tidak rutin, yaitu kegiatannya tidak memiliki ketepatan waktu/jadwal yang jelas. Kegiatan persidanagn dilakukan di **Ruang Sidang Paripurna** dengan kegiatan antara lain :

- Sidang Umum Paripurna
Adalah sidang dewan legislatif yang diadakan dalam pembentukan RAPBD dan penetapan APBD, penetapan Peraturan Daerah (Perda), pertanggungjawaban Bupati, sidang pengajuan proyek Pemerintah Daerah dan sebagainya.
 - Sidang Khusus Paripurna
Sidang yang diadakan dalam pemecahan suatu masalah khusus daerah dari masyarakat sampai pemerintah seperti sidang tanggapan dari pengajuan pendapat/orasi oleh masyarakat melalui demonstrasi atau oleh kelompok masyarakat melalui penyampaian pendapat.
- c. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan pendukung adalah aktifitas yang dilakukan pada saat proses persidangan diadakan meliputi persiapan persidangan sampai saat proses persidangan. Dalam kegiatan ini memiliki aktifitas yang kompleks dari pelaku (masyarakat, pemerintah eksekutif, anggota dewan, maupun pers) dengan kebutuhan ruang antara lain :
- Parkir
 - Lobby dan ruang informasi
- 2. kegiatan yang bersifat semi publik**
- a. kunjungan
kegiatan ini merupakan kegiatan yang mempunyai konsentrasi aktifitas berada di luar gedung DPRD, hanya saja dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana antara lain Ruang **Transit dan Garasi (ruang kendaraan)** sebagai wadah prasarana penunjang.
- b. Kegiatan sidang
Kegiatan ini merupakan kegiatan intern yang umum dan dapat dihadiri oleh unsur pers, yang antara lain berupa :
- Sidang Komisi

- Sidang Fraksi
- Sidang Risalah

c. Wawancara

Yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan unsur masyarakat tertentu ataupun pihak pers. Kegiatan ini bersifat semi publik sehingga membutuhkan karakter ruang yang khusus berupa **Ruang Pers dan Ruang Tamu**.

3. Kegiatan yang bersifat privat

Kegiatan yang meliputi aktifitas rutin kerja bagian sekretariat Gedung DPRD dan anggota DPRD itu sendiri yang pada pelaksanaannya dibagi dalam jabatan-jabatan tugas dengan kebutuhan ruang yang disesuaikan menurut jabatan tersebut antara lain :

- a. Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua Dewan
- c. Anggota Dewan

Yaitu keseluruhan dari elemen fraksi-fraksi dalam DPRD yang dibagi dalam tugas :

- Anggota Komisi
- Anggota Fraksi

4. kegiatan yang bersifat servis

Adalah kegiatan pelayanan dari kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan secara pribadi/privasi atau dibantu oleh petugas, kegiatan ini lebih bersifat untuk pelayanan terhadap pengguna gedung.

kegiatan ini membutuhkan ruang antara lain :

- a. Lavatory
- b. Mushola
- c. Lapangan olah raga
- d. Perpustakaan
- e. Kafetaria

4.3 Kebutuhan Ruang pada Gedung DPRD

Pada prinsipnya pemenuhan ruang diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang yang mendukung aktifitas pengguna baik dari segi kualitatif maupun yang dapat memwadhahi manusia dan prasarana kerja seperti peralatan dan ruang gerak pengguna

a. Studi Ruang Gedung DPRD

	DPRD Sragen	DPRD Sleman
Anggota DPRD		
R. Sidang Paripurna	1 Ruang	1 Ruang
R. Sidang Komisi	1 Ruang	1 Ruang
R. Sidang Fraksi	-	-
R. Ketua	1 Ruang	1 Ruang
R. Wakil Ketua	3 Ruang	3 Ruang
R. Komisi	5 Ruang	5 Ruang
R. Fraksi	7 Ruang	7 Ruang
R. Tamu/Pers	2 Ruang	2 Ruang
R. Transit	-	1 Ruang
Lavatory	1 Ruang	1 Ruang
Sekretariat DPRD		
R. Sekretariat	1 Ruang	1 Ruang
R. Rapat Risalah	-	-
R. Risalah	1 Ruang	1 Ruang
R. Ka.Bag	3 Ruang	3 Ruang
R. Staff/Karyawan	4 Ruang	4 Ruang
R. Perpustakaan	1 Ruang	1 Ruang
Lavatory	1 Ruang	1 Ruang
Garasi	2 Ruang	2 Ruang

Dari data ruang di gedung DPRD Sragen dan Sleman kelompok peruangan dibagi dalam 2 kelompok tugas yaitu kelompok *Ruang Anggota DPRD* dan kelompok *Ruang Sekretariat DPRD* yang terdiri dari pengelompokan jenis pengguna ruang yaitu ruang publik, semi publik, dan servis.

b. Kelompok dan Susunan ruang Gedung DPR

Kebutuhan ruang kantor dapat dihitung dengan menggunakan cara, yakni ruang gerak perorangan x jumlah orang ditambah ruang tambahan untuk sarana penunjang ditambah sirkulasi 15-20% (Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, Data Arsitek Jilid I Hal 11)

Jenis Pengguna	Anggota DPRD	Jml	SI/m ²	Sekretariat DPRD	Jml	SI/m ²
Publik	R. Sidang Paripurna	1	1,25	Parkir	1	12
	Hall	1	1,5	Taman	1	-
	Parkir	2	12			
	Taman	1	-			
Semi Publik	R. Sidang Komisi	1	3	R. Rapat Risalah	1	3
	R. Sidang Fraksi	1	3	R. Tamu	2	2,5
	R. Tamu	2	2,5	Garasi	1	12
	R. Pers	3	2,5			
	R. Transit	1	3			
	R. Ketua	1	30	R. Sekretaris	1	25
	R. Wakil Ketua	3	20	R. Kepala Bagian	6	15
	R. Komisi	5	8	R. Staff	6	6
Servis	R. Fraksi	7	8	R. Karyawan	3	6
				R. Risalah	1	6
				Lavatory	4	8
	Lavatory	5	3	Mushola	1	3
	mushola	1	0,65	perpustakaan	1	0.65

*)SI/m² (standart luas ruang perorangan ditambah perabot dan sirkulasi untuk perkantoran (Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, Data Arsitek jilid I, 1997).

Dalam perancangan gedung DPRD Sragen ruang-ruang yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi yang ada dengan standar luas ruang sesuai dengan aturan yang ada.

4.4 Analisa kegiatan pelaku.

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan gedung DPRD Sragen meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, privat, dan

kegiatan servis. Kegiatan tersebut dikelompokkan dalam dua badan tugas yaitu kelompok anggota DPRD dan staff Sekretariat, kegiatan tersebut antara lain :

Kegiatan	Fungsi ruang	Pelaku	Jml	Keb. ruang	Fasilitas
Demonstrasi	Publik	Masyarakat – Pers	200	R. Hall	Panggung orasi
		Anggota DPRD	40	R. Pengamatan	
		Petugas	20	Lavatory	
Sidang Paripurna	Publik	Masyarakat – Pers	150	R. Sidang Paripurna	Mimbar pimpinan
		Anggota DPRD	40	R. Pengelola	Suond sistem
		Petugas	10	R. Pengunjung	Meja-kursi
		Angg. Eksekutif	20	R. Pers Lavatory	
Parkir	Publik	Pengunjung	120 mbl	Parkir mobil	Pembatas
		Anggota DPRD	100 mtr	Parkir motor	Rambu-rambu
		Sekretariat	3 bis	Parkir bis	Pos jaga
Istirahat	Publik	Umum		Taman	Tempat duduk
				Mushola	
				Kafetaria	
				Perpustakaan	
				Lapangan	
Penyaluran pendapat	Publik	Masyarakat	40	R. penyaluran	Meja-kursi
		Anggota DPRD	8	pendapat	
		Petugas	2	Lavatory	
Penerimaan	Publik	Masyarakat, pers	150	Lobby	Meja penerimaan
		Petugas		R. Informasi	Alat komunikasi
				R. Tunggu	Kursi tunngu
Sidang	Semi publik	Anggota DPRD	10	R. Sidang Komis	Meja sidang
		Petugas	2	R. Sidang Fraksi	Suond sistem
				R. Rapat Risalah Lavatory	
Pelayanan	Semi publik	Petugas	2	R. Tamu	Meja-kursi
		Tamu	5	R. Pers	
Kunjungan kerja	Semi publik	Anggota DPRD	10	R. Transit	
		Petugas	2	Garasi R. Tunngu	
Rutinitas kerja	Privat	Anggota DPRD	40	R. Ketua DPRD	Meja-kursi
		Sekretariat	40	R. wakil Ketua	Lemari arsip
		Staff, karyawan		R. Komisi	
				R. Fraksi R. Arsip	

				R. Sekretaris R. Kepala Bagian R. Ka.Sub.Bag R. Karyawan R. staff Lavatory	
--	--	--	--	---	--

4.5 Analisa besaran ruang

Berdasarkan pada pendataan jumlah anggota Legislatif, pegawai, dan karyawan gedung DPRD Sragen terdiri dari 40 anggota Legislatif serta 40 pegawai dan karyawan Sekretariat DPRD. Berdasarkan tntutab terhadap penambahan ruang baru yang bersifat publik dengan melibatkan unsur masyarakat diasumsikan secara maksimum mewa dahi 200 orang.

Tabel besaran ruang bangunan gedung DPRD sragen :

a. Kebutuhan ruang Publik

Tabel ruang publik anggota dewan legislatif

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	R. Sidang Paripurna	1	150 masy, 40 angg Leg, 10 petugas, 20% sirkulasi 5% lain-lain	1.25 0.8	312.5
2	Lobby	1	75% dari masy, 20% sirkulasi	1.1	209
3	R. Hall	1	100% dari masy, 100% angg Leg, 50%petugas, 20% sirk 5% lain-lain	1.5	487.5
4	Parkir	1	60 mobil 150 motor 3 bis	12 1.5 44	1360.8
5	R. Penyaluran pendapat	1	20% masy, 20% angg. Leg 5%petugas	2.5	125
6	Taman		menyesuaikan		
JUMLAH					2494.8

Tabel ruang publik sekretariat DPRD

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	Parkir	1	40 mobil 80 motor	12 1.5	720
2	Taman		menyesuaikan		
JUMLAH					720

b. Kebutuhan ruang Semi Publik

Tabel ruang semi publik anggota dewan legislatif

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	R. Sidang Komisi	2	25% Anggota Legislatif 5% petugas	3	72
2	R. Sidang Fraksi	2	25% Anggota Legislatif 5% petugas	3	72
3	R. Tamu	2	5 orang	2.5	25
4	R. Pers	3	5 orang	2.5	37.5
5	Transit	1	25% Anggota Legislatif 5% petugas	2.5	36
JUMLAH					242.5

Tabel ruang semi publik sekretariat DPRD

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	R. Risalah	1	25% Sekretariat 10% Anggota Legislatif	3	42
2	R. Tamu	2	5 orang	5	25
3	Garasi	5	5 kendaraan	12	60
JUMLAH					127

c. Kebutuhan Ruang Privat

Tabel ruang privat anggota dewan legislatif

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	R. Ketua Dewan	1	1 orang	30	30
2	R. Wakil Ketua	3	1 orang	20	60
3	R. Komisi	5	7 orang	8	280
4	R. Fraksi	7	5 orang	8	280
5	R. Arsip	1	1 orang	16	16
JUMLAH					666

Tabel ruang privat sekretariat DPRD

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	R. Sekretaris	1	1 orang	25	25
2	R. Kepala Bagian	3	1 orang	15	45
3	R. Ka. Sub. Bagian	6	1 orang	12	72
4	R. Karyawan	3	4 orang	6	72
5	R. Risalah	1	2 orang	8	16
6	R. Staff	6	5 orang	6	180
JUMLAH					410

d. Kebutuhan Ruang Servis

Tabel ruang servis anggota dewan legislatif

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	Lavatory	5	5 orang	3	75
2	Lapangan O.R		menyesuaikan		
3	Mushola	1	100 orang	0.7	70
JUMLAH					145

Tabel ruang servis sekretariat DPRD

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas (m ²)	Jumlah (m ²)
1	Lavatory	4	3 orang	3	36
2	Lapangan O.R		menyesuaikan		
3	Mushola	1	100 orang	0.7	70
4	Perpustakaan R. Baca	1	3 petugas	3	9
			50 pengguna	0.8	40
			50 pengguna	0.8	40
5	Kafetaria	1	100 pengguna	1.4	140
6	Dapur	1	1 orang	8	24
JUMLAH					359

5. Tinjauan Gedung DPRD Sragen

5.1 Struktur dan Unsur Pelaku dalam Gedung DPRD Sragen

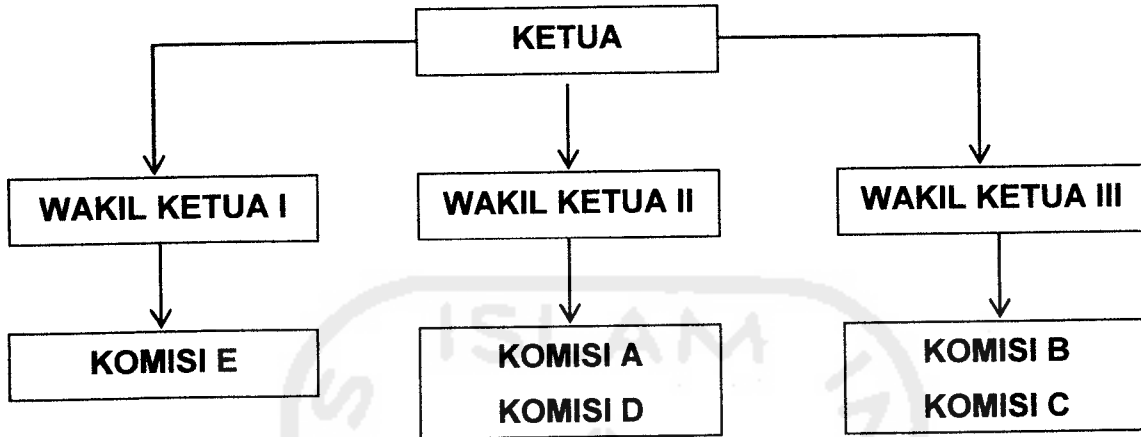
Dalam struktur organisasi pelaku di gedung DPRD dibagi atas kerangka kerja yang terdiri dari :

A. Struktur Keanggotaan DPRD Sragen

Unsur pelaku dalam keanggotaan DPRD Sragen terdiri dari anggota fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan (Golkar), fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi PDI Perjuangan, fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), dan fraksi Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh 40 anggota legislatif dan dibagi atas 5 bidang kerja komisi yang dibawah oleh Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, dan sisanya sebagai anggota dengan bidang tugas sabagai berikut (*Tim, Bagan struktur Keanggotaan DPRD TK II Sragen, DPRD Sragen*) :

1. Komisi A membawahi bidang Pemerintahan (7 anggota)
2. Komisi B membawahi bidang Perekonomian (7 anggota)
3. Komisi C membawahi bidang Keuangan (8 anggota)

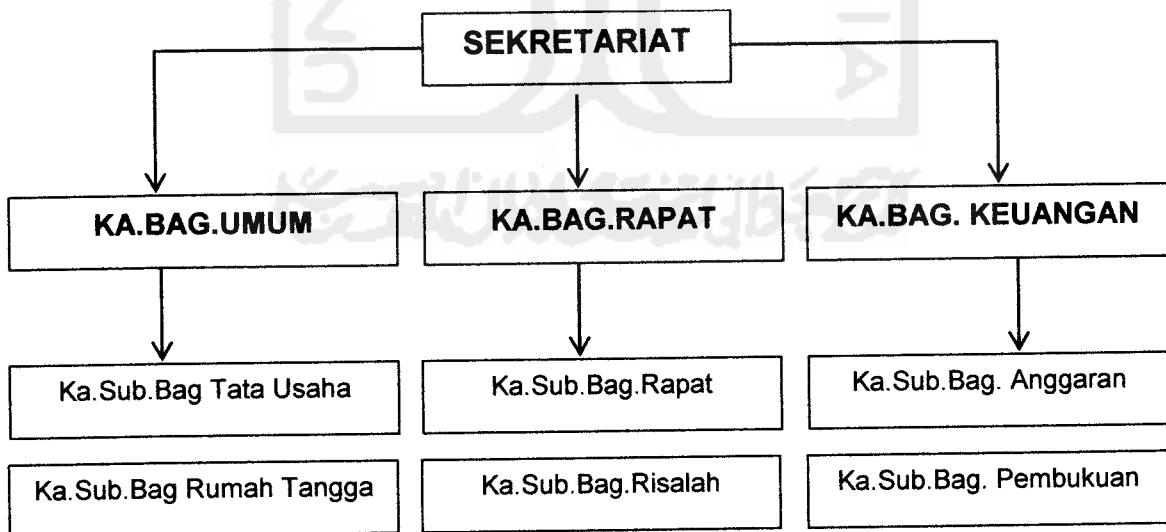
4. Komisi D membawahi bidang Pembangunan (7 anggota)
 5. Komisi E membawahi bidang Kesejahteraan Rakyat (7 anggota)
- Adapun dalam kepengurusannya dipimpin oleh satu ketua DPRD dengan tiga wakil ketua yang berfungsi sebagai kordinator komisi.



Struktur Organisasi DPRD Sragen

B. Struktur Sekretariat DPRD Sragen

Sekretariat DPRD Sragen adalah unsur pelaku sebagai pengelola kegiatan anggota legislatif yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan ahrian gedung DPRD Sragen. Kedudukan sekretariat DPRD ada dibawah pengelolaan Pemerintah Eksekutif dengan struktur pembagian tugas sebagai berikut :



Struktur Sekretariat DPRD Sragen

Keterangan jabatan dalam pembagian tugas adalah sebagai berikut :

Kepala Sub.Bag. Tata Usaha	Kepala Bag. Rapat	Kepala Sub.Bag.Anggaran
Urusan surat masuk	Tunis komisi (5 staff)	Pemegang kas
Urusan surat keluar	Urusan administrasi	Pembantu pemegang kas
Urusan kepegawaian	Kep.Sub.Bag. Pembukuan	Kep.Sub.Bag. Rumah Tangga
Penerima tamu, surtat masuk	Bendaharawan gaji	Urusan kendaraan
Penjaga telepon, Ajudan ketua	Pembuat dftar gaji	Urusan kebersihan kantor
Penjaga suond sistem	Kep.Sub.bag. Risalah	Urusan ketertiban
Pengantar surat	Notulis (2staff)	Pengemudi (4 karyawan)

6. Tinjauan Ekspresi Bangunan

6.1 Aspek Guna dan Citra

guna merupakan fungsi ruang-ruang menyesuaikan dengan aktifitas yang diwadahi yang menjadi pembentuk citra atau kesan bangunan, sedangkan citra sebagai ekspresi kesan bangunan dari bagian yang diwadahi merupakan perwujudan dari fungsi bangunan itu sendiri. Sehingga citra yang terbentuk bukan hanya berupa ekspresi atau simbol saja tetapi kesan yang ditimbulkan karena pengaruh penerapan ruang dan bangunan atas fungsi.

6.2 Ekspresi Citra Keterbukaan dan kewibawaan

Dalam merencanakan bangunan diperlukan pengungkapan suatu ekspresi untuk mewujudkan penampilan bangunan agar dapat dimengerti pesan-pesan dan makna yang ingin diperlihatkan, ekspresi sendiri dalam arsitektur seperti bahasa yang identik dengan komunikasi (*Frderick A. Jules, Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsiterktur*). Pengungkapan ekspresi pada sebuah bangunan merupakan suatu bahasa arsitektur, yaitu komunikasi secara tidak langsung yang diungkapkan oleh bangunan kepada penggunanya. (*Wiryono Ir, Diktat Teori Arsitektur, Universitas Islam Indonesia, 1996*). Oleh sebab itu dalam merencanakan gedung DPRD Sragen perlu adanya kesan dan citra yang mengkomukasikan visual bangunan sebagai wadah yang merespon pemakaiannya dalam kesan terbuka dan

wibawa dalam konteks arsitektur tradisional Jawa yang terbentuk melalui fungsi tata ruangnya yang dipadukan dengan arsitektur Postmodern pada fasad bangunan.

Kesan keterbukaan dan kewibawaan tercermin sangat kuat dalam arsitektur Jawa dalam hal ini Rumah Jglo. Karakter Joglo yang memiliki kesan terbuka yang kuat dengan pendopo yang terletak di depan dengan pembatas kolom-kolom yang dinamakan dengan **soko**. Soko merupakan pembatas atau partisi yang memiliki tingkat kerapatan yang rendah, dengan demikian kesan terbuka sangat kuat. Kewibawaan dapat diwakili dengan ornamen yang melambangkan kekuatan. Karakter arsitektur Jawa yang memiliki kesan keterbukaan dan yang sangat kuat kemudian diepresiasikan ke dalam bangunan gedung DPRD Sragen.

Adapun faktor penentu Kewibawaan dan Keterbukaan antara lain :

- a. **Komposisi**
- b. **Hirarki**
- c. **Skala**

Kesan keterbukaan dan kewibawaan tercipta melalui komposisi, hirarki, dan skala yang disesuaikan dengan unsur-unsur masam ruang, bentuk bangunan atau fasad serta sirkulasi yang disesuaikan dengan keterkaitan antara keduanya. Hal tersebut yang dijadikan pedoman dalam menganalisa unsur-unsur yang mempengaruhi keterbukaan dan kewibawaan yang dapat diterapkan kedalam perancangan gedung DPRD Sragen.

6.2.1 Kesan Keterbukaan

Kata Keterbukaan merupakan kata sifat dari kosakata terbuka, makna terbuka sendiri identik dengan sesuatu yang bebas tanpa penutup atau penghalang.

Dalam pengertian arsitektur "**terbuka**" dapat diukur dengan derajat keterbukaan secara **hirarki** pada media atau masa pembentuk dan komposisi ruang untuk menimbulkan perasaan tertentu pada pemakai (Fjriyanto. Ir, MTP, *Diktat perencanaan Tapak II, Universitas Islam Indonesia, 1995*). Pada media bahan dapat diukur melalui tingkat kepadatan unsur pembentuknya dimana unsur-unsur yang semakin rapat menghasilkan media yang semakin tertutup. Sedangkan dalam **komposisi** pada ruang tertutup dipengaruhi oleh sudut pembentuk dimana sudut yang tertutup akan menghasilkan ruang yang semakin tertutup.

6.2.2 Kesan Kewibawaan

Kata Kewibawaan merupakan kata sifat dari kata wibawa, kewibawaan sendiri identik dengan sesuatu yang kuat yang memiliki kekuasaan ataupun pengaruh.

Dalam arsitektur "**kewibawaan**" dapat diperlihatkan melalui derajat dimensi ruang dan perletakan. Pada derajat ruang, **skala** yang memiliki tinggi dan lebar lebih besar akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa, sedangkan pada **hirarki** derajat perletakan, sesuatu yang memiliki letak lebih tinggi akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa. Selain itu wibawa dapat ditunjukkan melalui rangka yang rigid, kokoh dan kuat serta ornamen bangunan yang indah yang melambangkan kekuatan.

Kedua kosaka diatas merupakan suatu arti yang abstrak karena berupa kata sifat yang menjelaskan karakter benda. Untuk diterjemahkan dalam bentuk arsitektural bangunan yang mempunyai kesan tersebut harus memiliki batasan arti. Untuk itu diperlukan standar pendekatan dari suatu benda yang memiliki persamaan makna atau maksud. Pendekatan tersebut dilakukan pada bangunan berarsitektur Jawa dalam mengekspresikan kesan keterbukaan dan kewibawaan.

6.3 Penampilan pada Gedung DPRD

Citra atau kesan dapat terbaca dari ekspresi penampilan bangunan sehingga tinjauan pada aspek-aspek penampilan bangunan haruslah menjadi faktor penting dalam perencanaan dan perancangan arsitektur, adapun unsur yang membentuk penampilan bangunan antara lain :

1. Bentuk

Bentuk terkait dengan masa, dan bentuk-bentuk dasar. Organisasi bentuk keseluruhan akan lebih mengekspresikan isinya, sehingga komunikasi dari sang arsitek terhadap perasaan dari bentuk bangunan akan semakin tegas dan jelas (*Antoniades, Anthony c. Persepsi in Architecture, van Raynold, 1992*). Setiap bentuk mempunyai karakter yang berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap persepsi yang ditimbulkan. Fungsi yang diekspresikan dengan jelas akan menimbulkan karakter, sedangkan lekukan vertikal dan horizontal menimbulkan kesan perspektif (*Ishar, HK, Pedoman Umum Merancang Bangunan, Gramedia, 1992*).

2. Fasade

Fasade merupakan wujud atau rupa bangunan sebagai unsur pembentuk citra bangunan.

Menurut Ishar HK yang termasuk dalam Fasade adalah :

- a. **Karakter**, jika semua bangunan dibuat dengan ukuran dan menurut fungsinya maka dengan sendirinya terjadi suatu pengelompokan bentuk dan ukuran menurut jenisnya. Masing-masing mempunyai ciri

atau karakter tersendiri, misalnya karena ukuran jendela, tinggi plafond, dan sebagainya.

- b. **Gaya**, dalam arsitektur gaya berarti suatu cara membangun atau merancang secara berbeda dengan yang lain atau juga sesuai dengan bangunan yang ada disekitarnya. Gaya dapat terjadi karena mengikuti sejarah suatu jaman atau kebudayaan, pemakaian bahan, iklim, detail, dan pribadi arsitek.
- c. **Warna**, peranan warna dalam arsitektur dipakai untuk memperkuat bentuk dan kesan yang ditimbulkan. Warna memberikan ekspresi kepada pikiran atau jiwa manusia yang melihatnya, oleh sebab itu warna sedikit banyak mempengaruhi karakter.

3. Material

Pemilihan dan pengolahan bahan akan mempengaruhi kesan pandangan antara ekspresi bahan dan pengamatnya. Karakter dan kesan dari bahan bangunan dapat berbeda, tergantung dari cara pengolahan bahan hingga dapat dipergunakan. Kesan material yang didapat adalah kesan keseluruhan yang merupakan perpaduan bahan atau kesan material yang paling menonjol.

4. Struktur

Struktur memegang peranan penting dalam memberikan kesan pada bangunan. Hal ini berkaitan dengan pemilihan bahan yang digunakan, karena sifat bahan berkaitan dengan sistem struktur dan kesan yang ditimbulkan. Misalnya beton baik untuk menahan gaya tekan sedangkan baja baik untuk menahan gaya tarik. Pemakaian selubung bangunan juga dapat mempengaruhi karakter. Misalnya pemakaian material kaca, dinding bata, dinding partisi, pemakaian bahan penutup atap dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi sistem strukturpun sudah jauh berkembang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memilih struktur dan bahan yang sesuai dengan fungsi yang dikehendaki

dan menghasilkan kesan yang dikehendaki (*Suwondo B Sutedjo, Persepsi Bentuk dan Konsep Arsitektur, hal 58, 1986*).

5. Visual Bangunan

Penentuan visual erat kaitanya dengan elemen-elemen dan prinsip-prinsip penyusunan tata ruang, yaitu :

- a. Proporsi
- b. Komposisi, susunan atau aturan antar komponen ruang
- c. Keseimbangan
- d. Irama, keteraturan dengan irama menunjukkan dinamis
- e. Keselarasan, diungkapkan dengan bentuk, warna, dan tekstur
- f. Kontras, ditunjukkan dengan bentuk, garis, warna, tekstur, vertikal dan horizontal

6. Warna dan Tekstur

Warna dapat dikatakan merupakan kualitas dari warna yang dipantulkan dari suatu permukaan atau dari sumber cahaya. Persepsi cahaya bervariasi tergantung pada kondisi-kondisi yang berpengaruh, yaitu (*Issac ARG, Pendekatan kepada Perancangan Arsitektur, Hal. 45, 1986*) :

- a. Tipe penerangan, penerangan alami atau buatan
- b. Jenis, pola dan tekstur permukaan
- c. Perhubungan warna dari figur dan latar belakang dalam situasi tertentu

Unsur-unsur penampilan bangunan diatas merupakan faktor yang menjadi pembentuk ekspresi bangunan yang selanjutnya disesuaikan dengan nilai-nilai makna keterbukaan dan kewibawaan kaitanya dengan Arsitektur Post-Modern.

7.1 ARSITEKTUR POST – MODERN

Post-Modern Arsitektur secara nyata adalah keterkaitan di dalam hubungan kemajemukan dan kompleksitas, walaupun dua kata kunci ini berasal dari satu sumber yang sama. Untuk mendapat kejelasan dari konsep umum yang terkait dengan definisi ini, maka akan diringkas dengan penekanan pada beberapa pemaknaan khusus

Strategi utama dalam arsitektur telah tercipta, untuk memberi penekanan yang nyata dari kemajemukan budaya yakni “Double-Coding” (perumusan masalah dibagi menjadi dua bahasan), yaitu : memadukan antara kreasi (rasa) profesional dan kemampuan teknis dengan klient mereka, yang merupakan para pemakai atau *user*. Perumusan masalah dibagi dalam beberapa tingkat, dan hal itu telah dilaksanakan dalam periode waktu tertentu: Hal itu dapat digambarkan berupa sebuah kuil kuno yang menggabungkan bentukan geometri tinggi dan rendah. Adalah suatu karya Post-Modern yang klasik yang dapat dilihat dari karya James Stirling, memadukan suatu bangunan monumental dengan teknologi tinggi : atau penggabungan suatu bahasa arsitektur yang “sederhana” dan “umum”, seperti dapat dilihat pada kasus Charles Moore.

Kemajemukan dua konsep dasar yang mewarnai suatu perbedaan mencolok dengan karya-karya kontemporer. Dari sini didapat pengertian Post-Modern. Tapi apapun kombinasinya, yang terpenting adalah konsep dari penjabaran dasar itu sendiri yang menjadi landasan tumbuh dan berkembangnya tradisi ini. (Post-Modern).

Arsitektur Modern kadang sangat sederhana, bahkan terkesan ‘tidak dibuat-buat’ seperti yang terlihat dan terbangun dari kepedulian dan maksud tentang Arsitektur itu sendiri. Hal ini bisa sangat berhasil atau bahkan merusak. Seperti terlihat mencolok, Post-Modern sangat terlihat ‘tajam’ dalam mengekspresikan bahwa arsitektur adalah suatu ‘bahasa visual’ dimana bisa dilihat perbedaan pada tiap-tiap budaya. Oleh karena itu, hubungan yang kompleks antara arsitek dengan klien, dapat dipisah

tau dengan kata lain dapat dijabarkan serta diterangkan dari kemajemukan bahasa teknis yang kompleks, melalui semiotic atau teori symbol atau tanda.

KESIMPULAN :

Post-Modern Arsitektur adalah penggabungan dari Arsitektur Modern dimana unsur *high-tech* sangat menonjol dengan bahan baku utama seperti baja dan beton sangat mendominasi pada era ini, sedangkan untuk ornamen bangunan pada masa ini hanya dipakai sebagai penegas komposisi dan Arsitektur Klasik yang sempat *booming* sebelum munculnya Arsitektur Modern, dimana bangunan-bangunan monumental sangat mendominasi ditambah dengan unsure ornamen yang menjadikan penampilan bangunan tampak lebih indah.

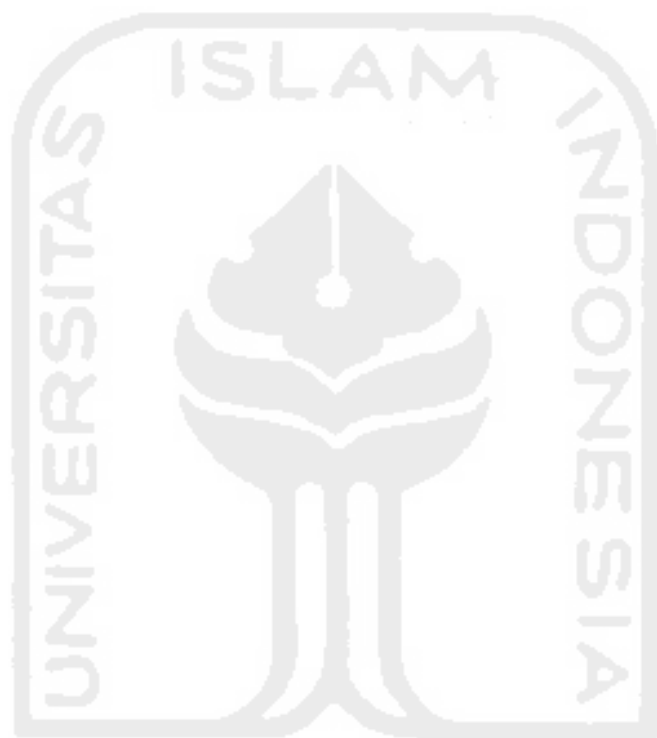
7.2 BANGUNAN ARSITEKTUR POST – MODERN

7.2.1 BANGUNAN : Callista Photo Digital,

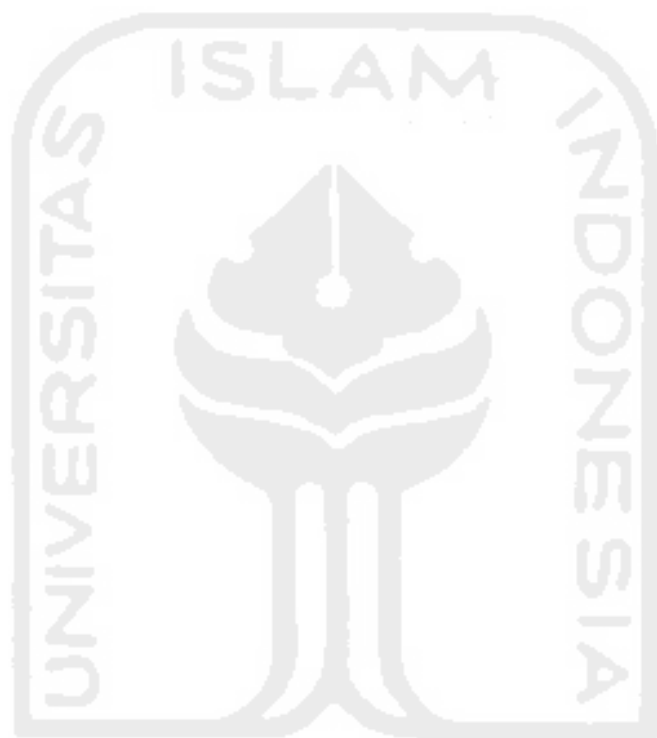
Jl. Ring Road Utara, Yogyakarta.



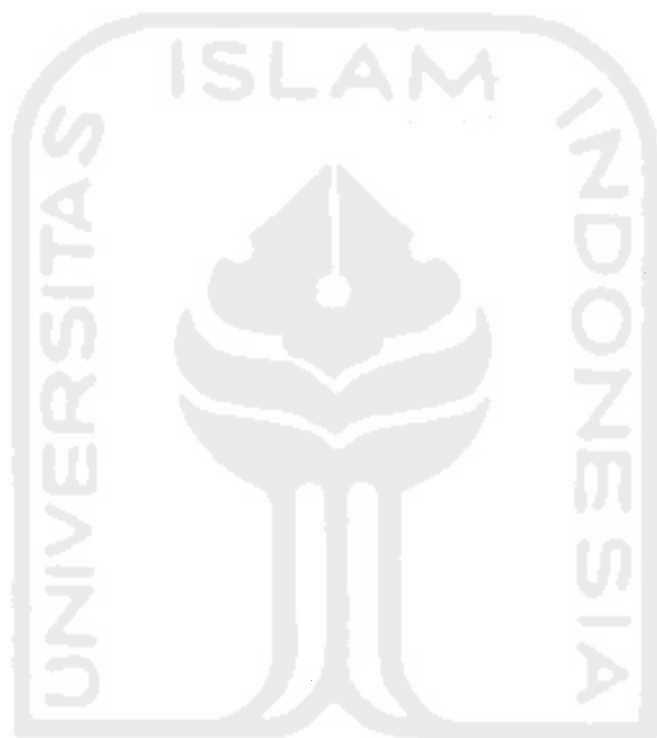
Penampilan bangunan ini sangat terasa dengan penampila bangunan yang didominasi dengan unsur *high-tech* nya, dimana dapat dilihat dari penggunaan material baja untuk rangka atapnya, dan kolom-kolom yang sengaja ditonjolkan oleh user sehingga terkesan lebih modern menonjol pada bangunan ini, serta permainan ornamen bangunan yang terlihat cukup kreatif, ditambah dengan pemakaian material kaca menjadikan bangunan ini tampak modern. Bangunan ini juga menampilkan permainan warna yang cukup baik, dan tidak terlalu ramai,



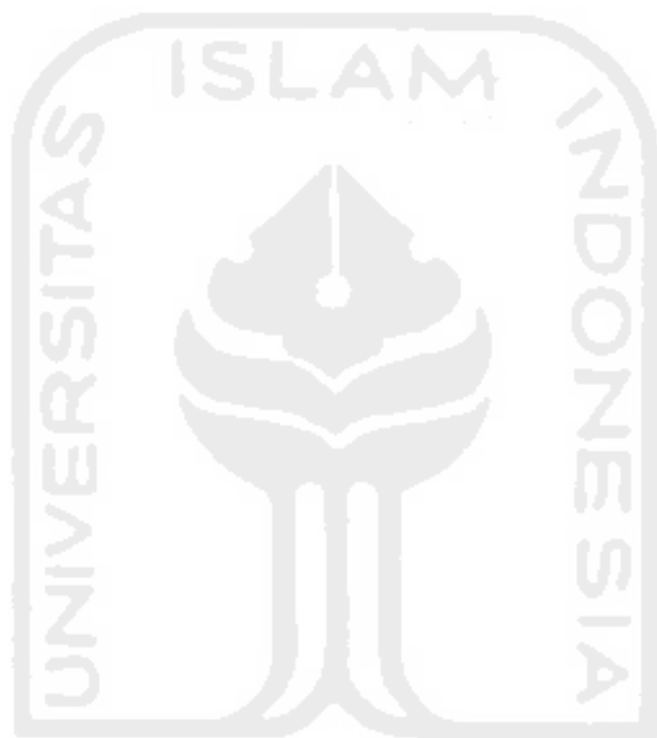
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



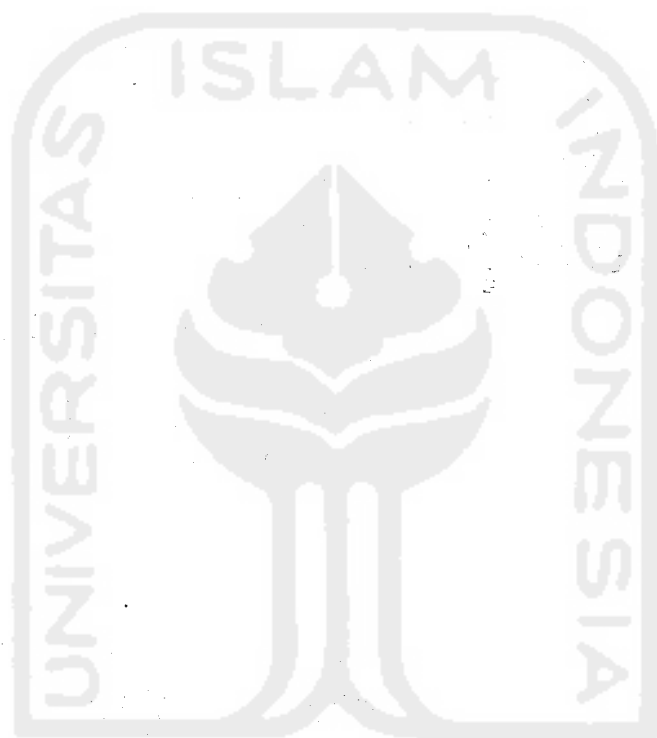
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



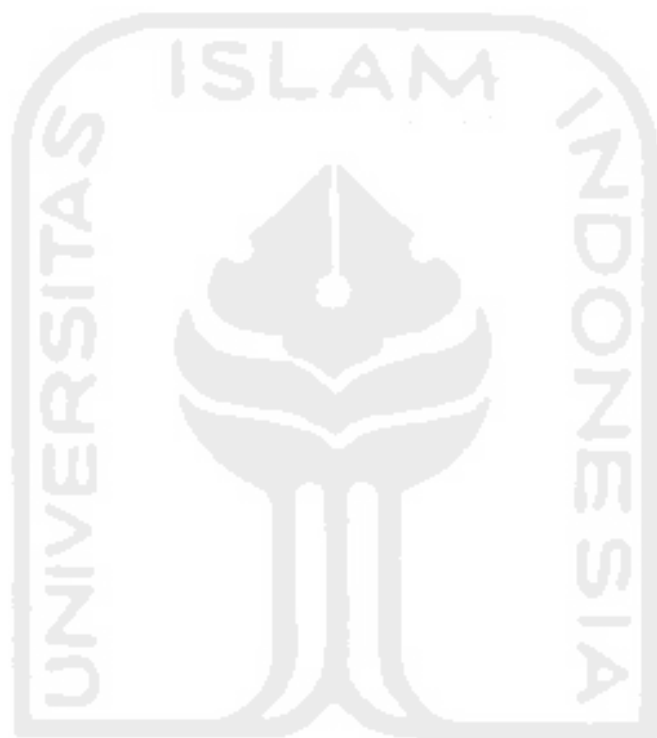
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



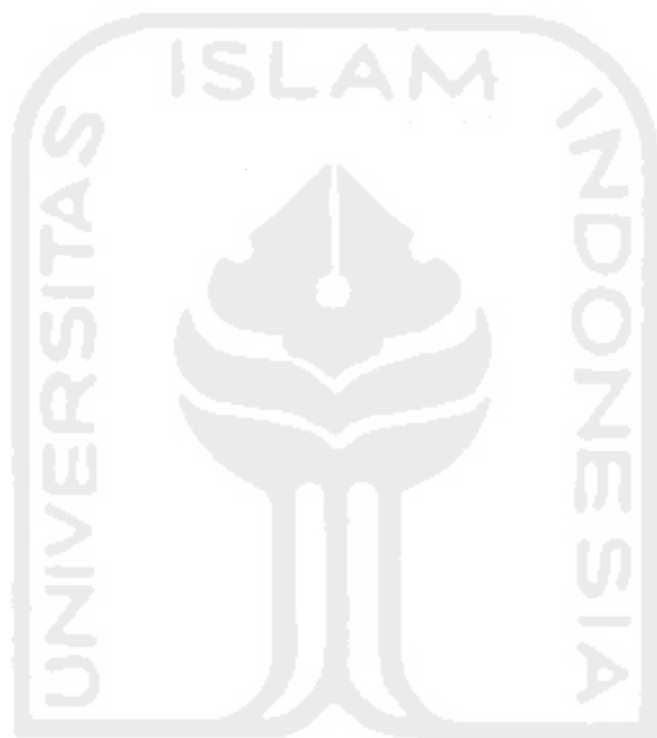
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



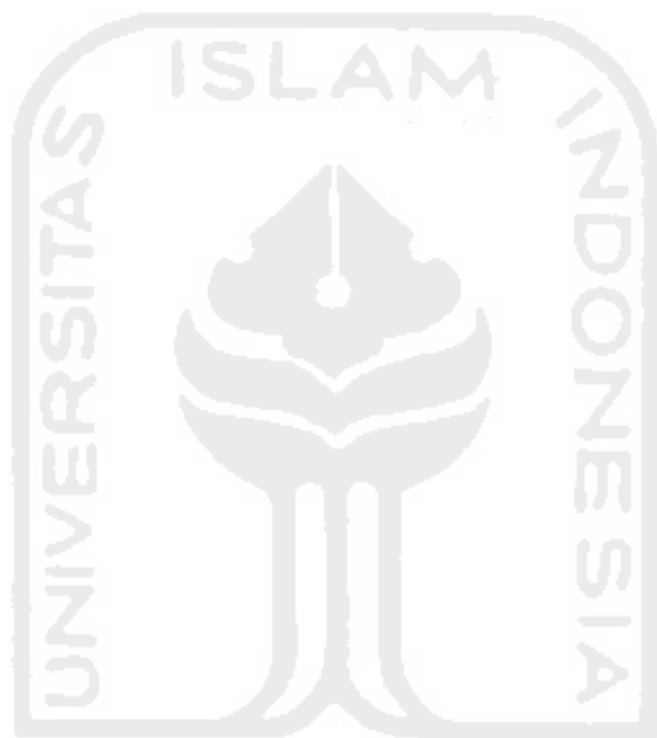
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



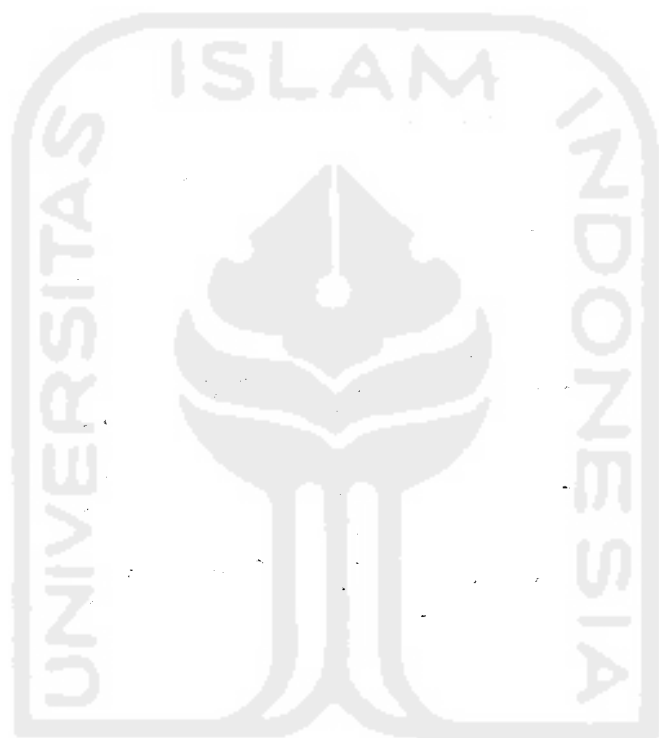
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

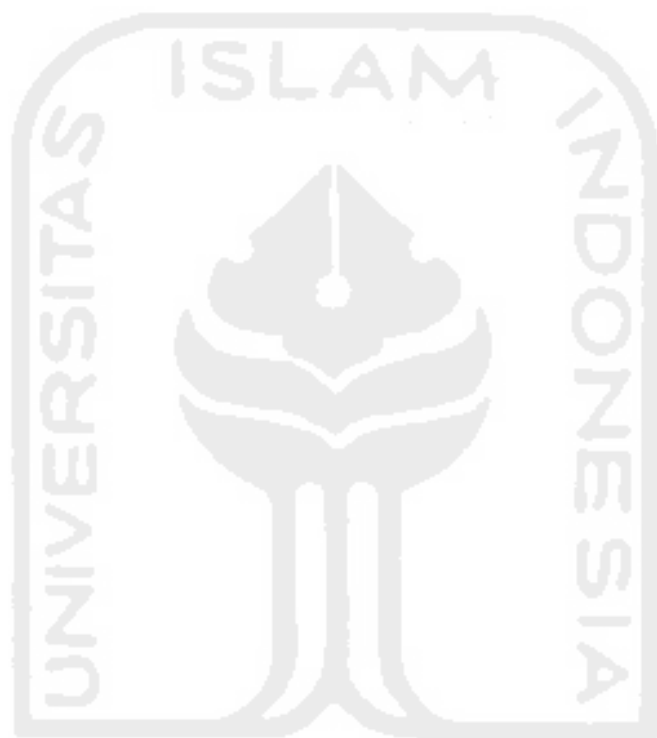


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Design Report

RELOKASI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI SRAGEN

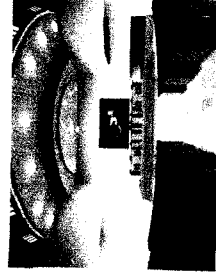
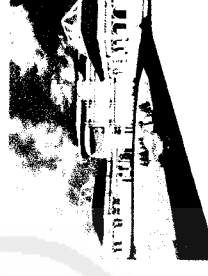
“ PENEKANAN PADA CITRA BANGUNAN POST-MODERN PADA PENAMPILAN BANGUNAN “

JOKO SUSILO

00 - 512 - 170

DOSEN PEMBIMBING

IR.SUPRIYANTA,MSi



SPEKIFIKASI TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JUDUL TUGAS AKHIR

RELOKASI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKTAT DAERAH DI SRAGEN

PENEKAPAN PADA CITRA BENGUNAN POST-MODERN PADA PENAMPILAN BANGUNAN

Design Report

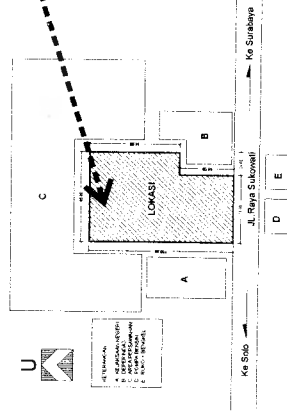
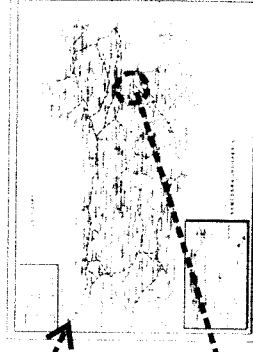
PERMASALAHAN

BAGAIMANA MENCIPTAKAN PENAMPILAN BANGUNAN
GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SRAGEN
DENGAN MENGEKSPRESIKAN BANGUNAN POST-MODERN

Lokasi Site Terletak Di Area Perkantoran
Tepatny Di Jalan Raya Sukowati KM 1 Sragen-Jawa Tengah



Sumber : Atlas, Penerbit Amelia Surabaya



Dengan Batasan Wilayah :

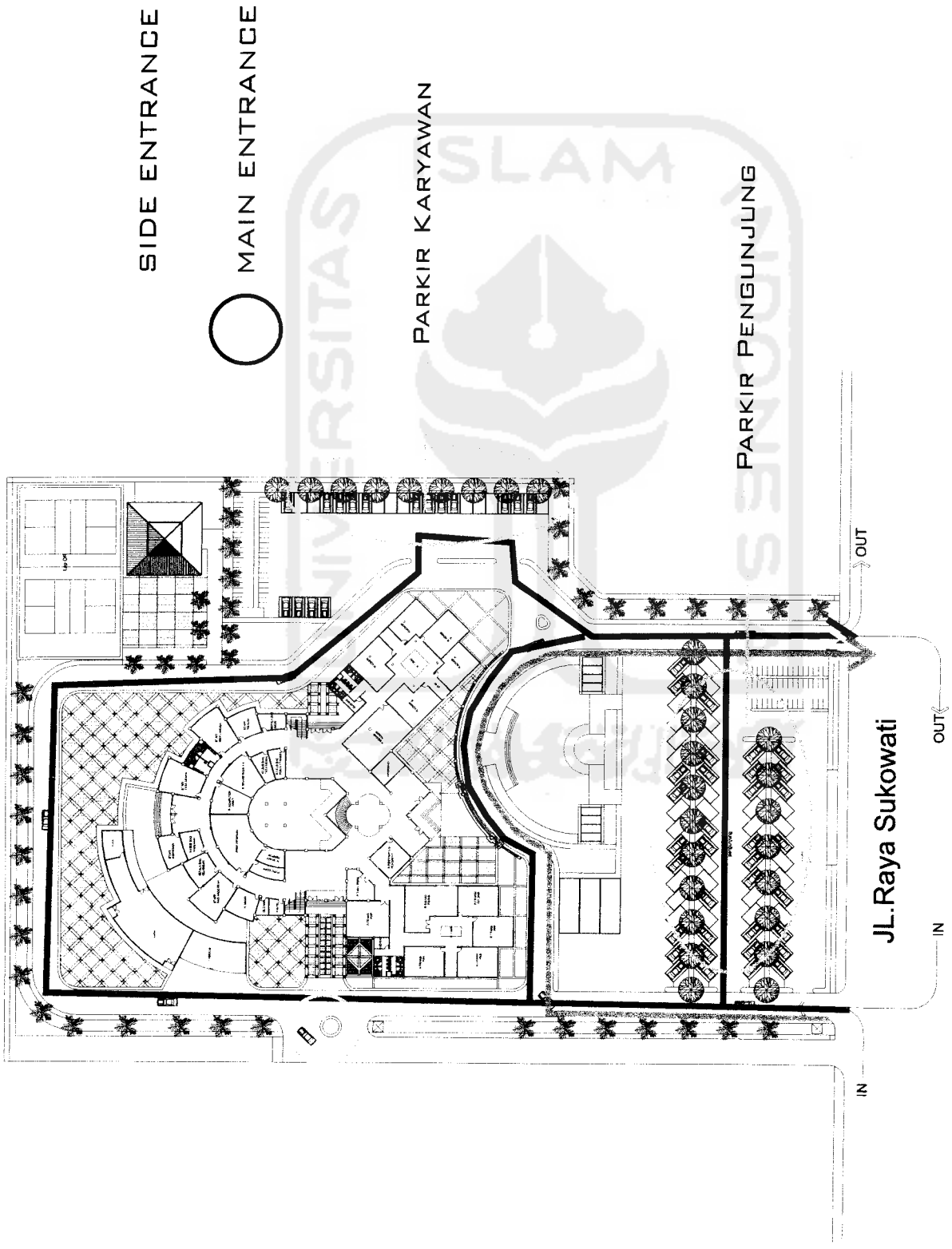
Sebelah Utara : Area Persawahan

Sebelah Selatan : Jalan Raya Sukowati

Sebelah Timur : Area Persawahan dan Gedung Deperindag

Sebelah Barat : Gedung Kajaksanaan Negeri Sragen

Sumber : RDTRK Kabupaten Sragen



SITE PLAN

Gubahan Massa



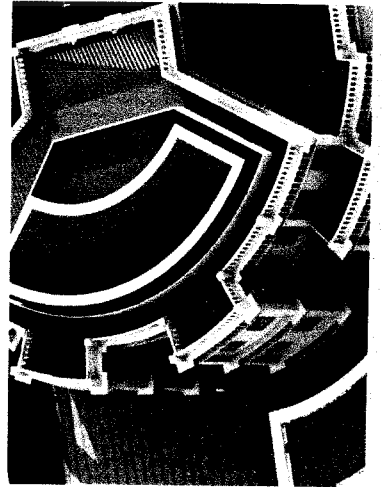
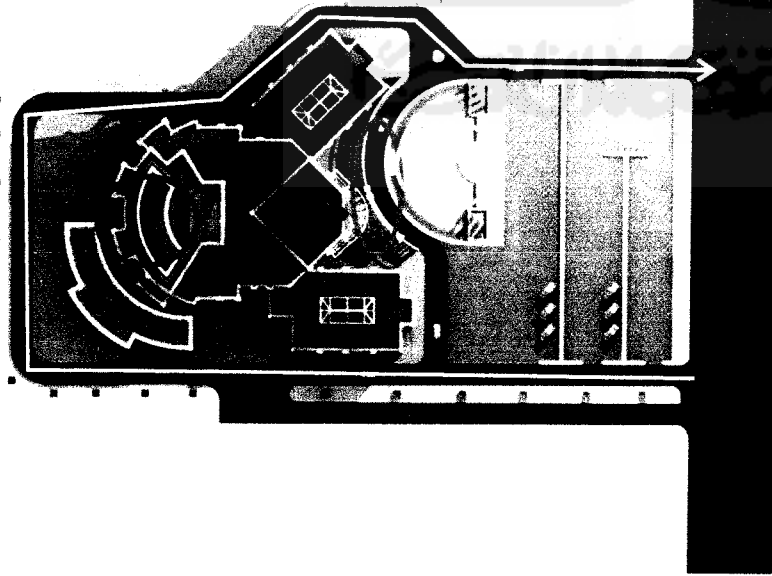
Terbentuk dari respon terhadap bentukan site dan bentuk huruf 'Y' dengan penggabungan antara bentuk lengkung dan kotak

Bentukan lengkung mengadopsi bentuk keris yang merupakan unsur lokal, dan keris merupakan simbol dari kekuatan/kekuasaan

Bentukan huruf 'Y' mempunyai sifat terbuka, dalam hal ini terbuka terhadap aspirasi rakyat

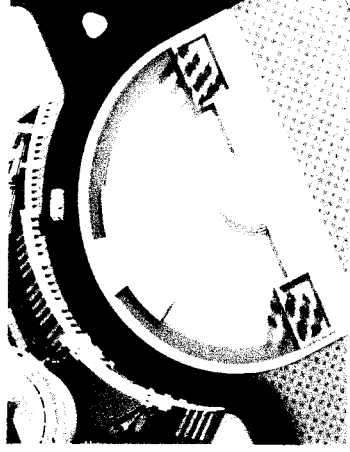
Jalur sirkulasi kendaraan memutar melewati depan dan belakang bangunan.

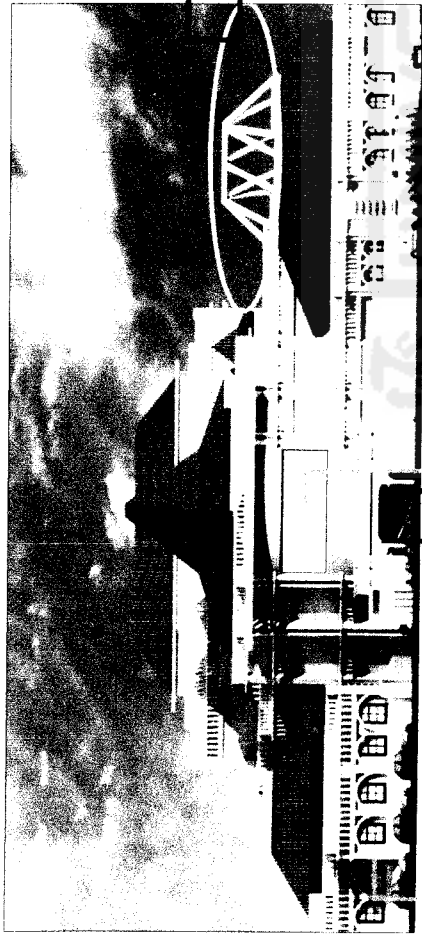
Main Entrance terdapat jajaran kolom yang disusun melengkung sebagai 'point of interest'



Bentukan lengkung mengadopsi bentuk 'luk' dari sebuah keris

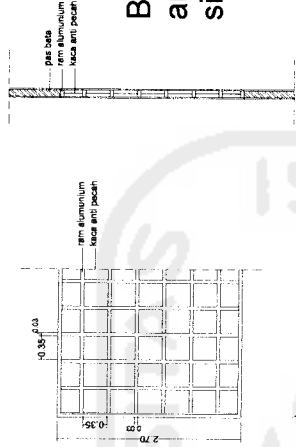
Open space memperkuat kesan keterbukaan



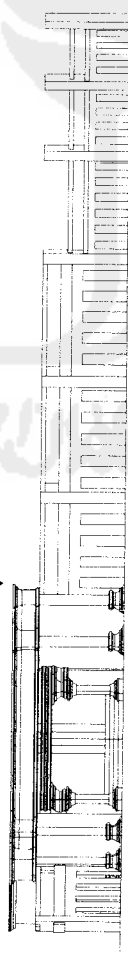


TAMPAK DEPAN

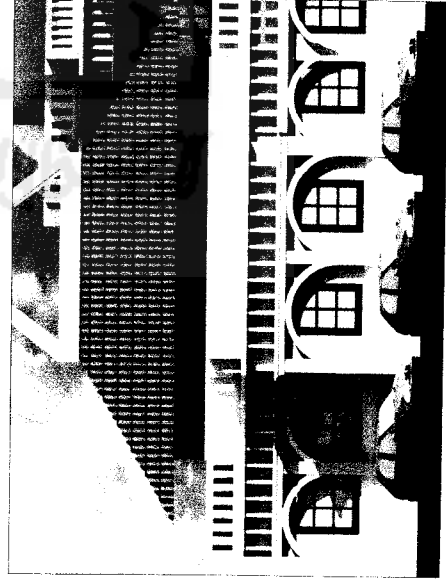
Kesan Post_Modern tampak pada bentuk atap dengan tajuk limasan yang diekspos strukturnya.



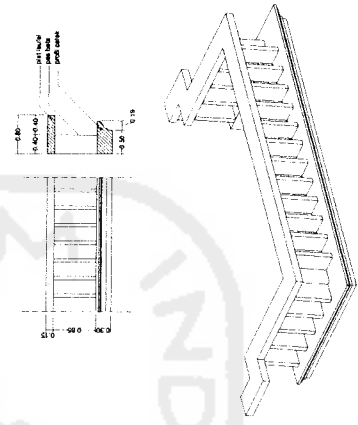
Bukaan lebar terbuat dari kaca anti pecah untuk mengetahui situasi diluar gedung.



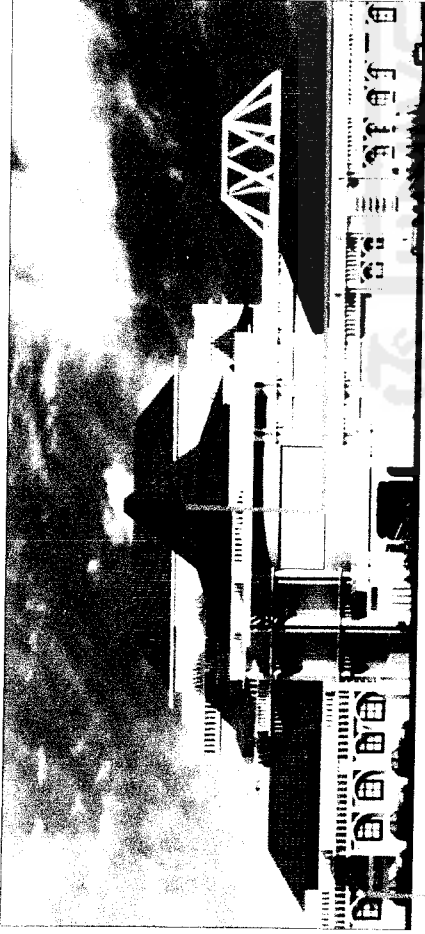
Suasana main entrance yang berkesan Post-Modern dengan jajaran kolom yang disusun melengkung mengikuti area Open space.



Ekspos struktur kolom balok memberikan kesan kokoh, dan berwibawa

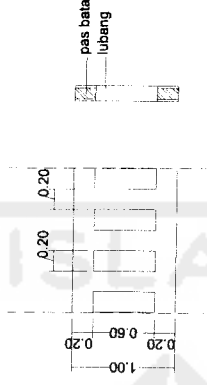


Sirip-sirip selain untuk penghawaan juga sebagai ciri bangunan Post-Modern



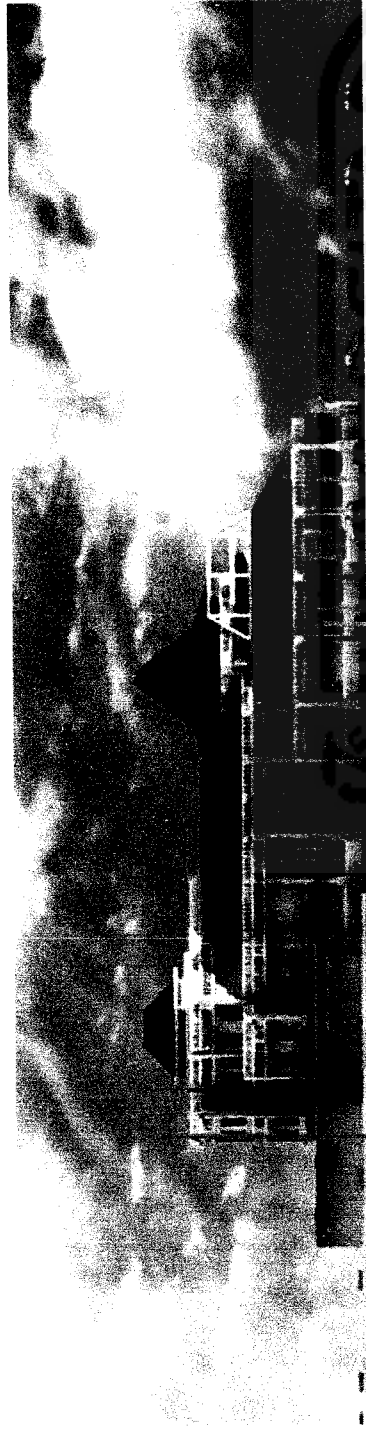
TAMPAK DEPAN

Tajak joglo yang merupakan ciri dari bangunan tradisional Jawa



Sirip-sirip selain untuk penghawaan juga sebagai ciri bangunan Post-Modern

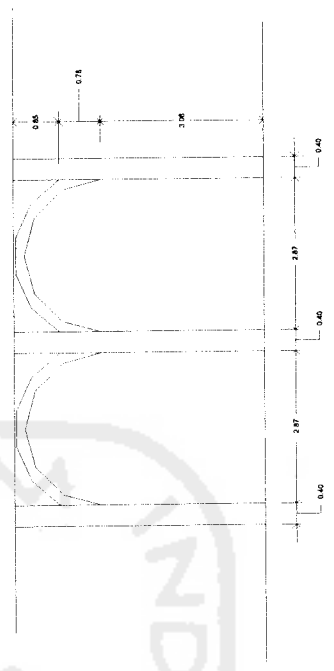
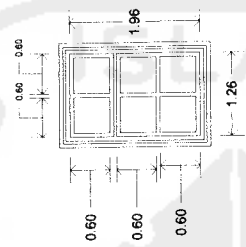
Ekspos struktur kolom balok memberikan kesan kokoh, dan berwibawa



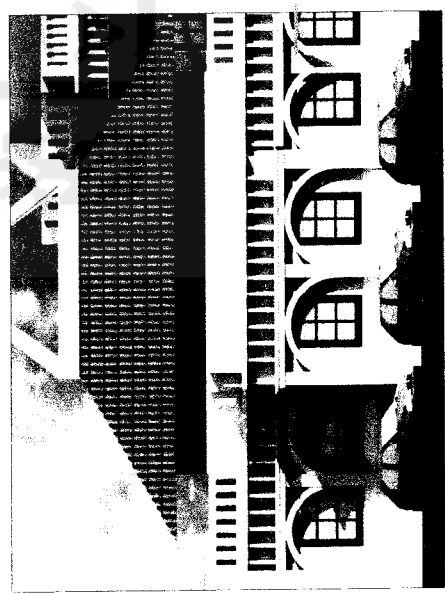
TAMPAK SAMPING

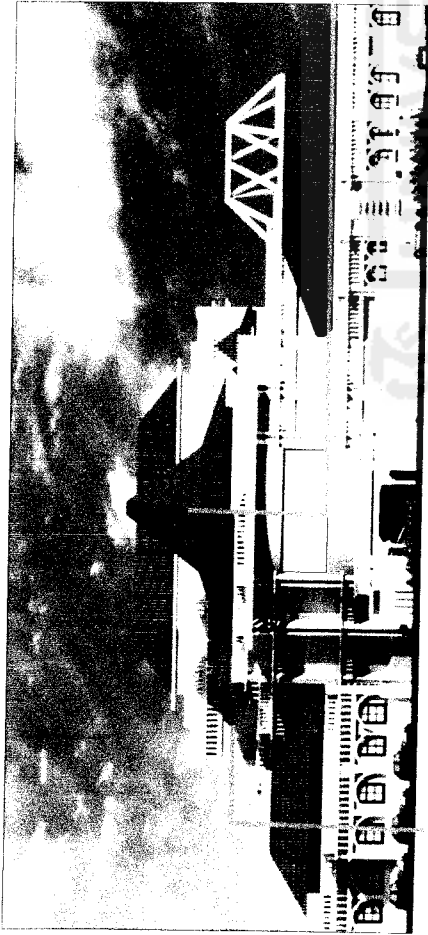
Hirarki tertinggi yang merupakan fungsi utama yaitu ruang sidang Paripurna

Ciri bangunan Post-Modern bukan dengan ram "+"



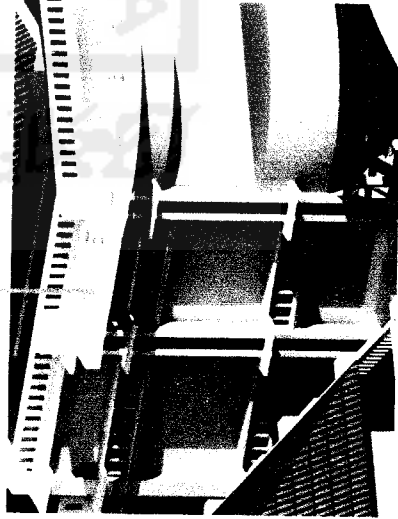
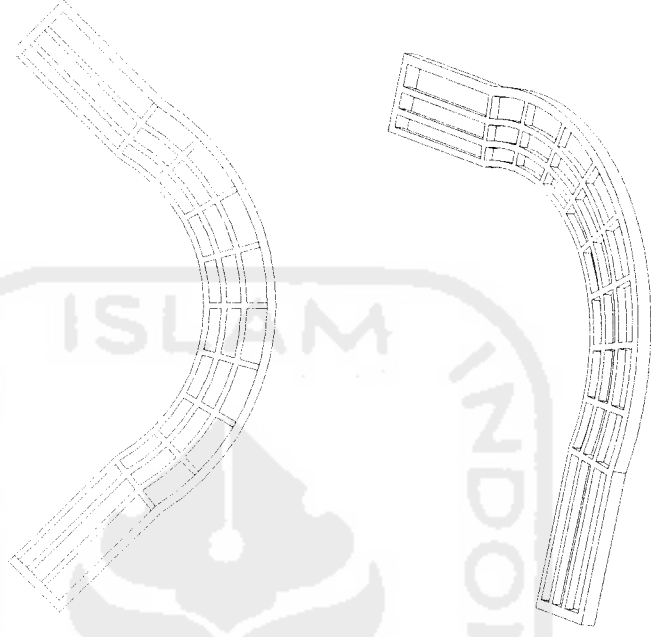
Ekpos struktur dengan balok lengkung yang diadopsi dari bentuk dari luk sebuah keris





TAMPAK DEPAN

Secara keseluruhan bentuk atap menggunakan atap limasan yang merupakan ciri dari bangunan tradisional Jawa

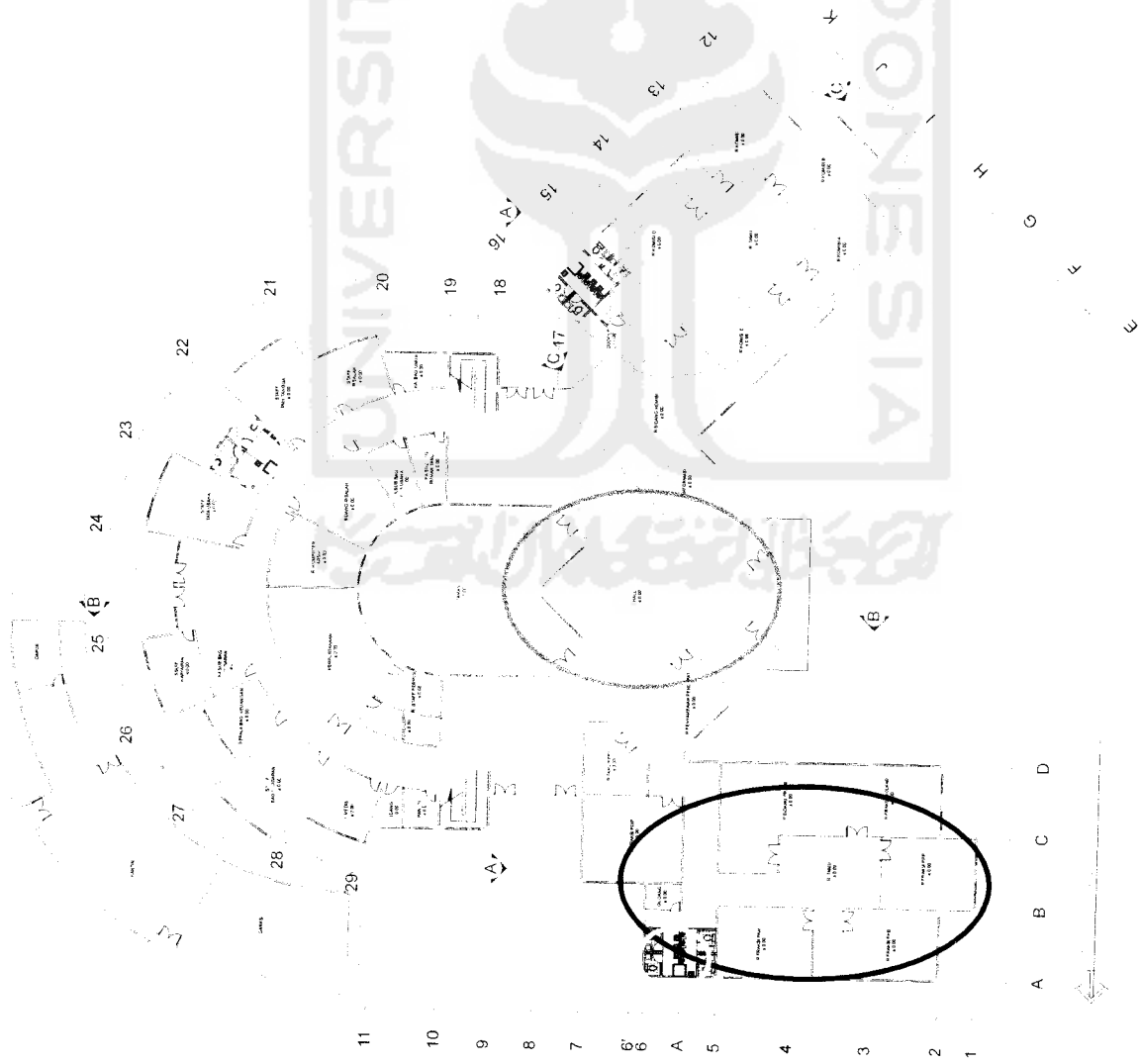


Ekspose struktur sebagai ciri bangunan Post-Modern, dengan mengekspose struktur shading dan kolom yang dipertegas dengan sirip-sirip

DENAH LANTAI 1

Denah Lantai 1 terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Hall
3. Ruang Fraksi
4. Ruang Komisi
5. Service

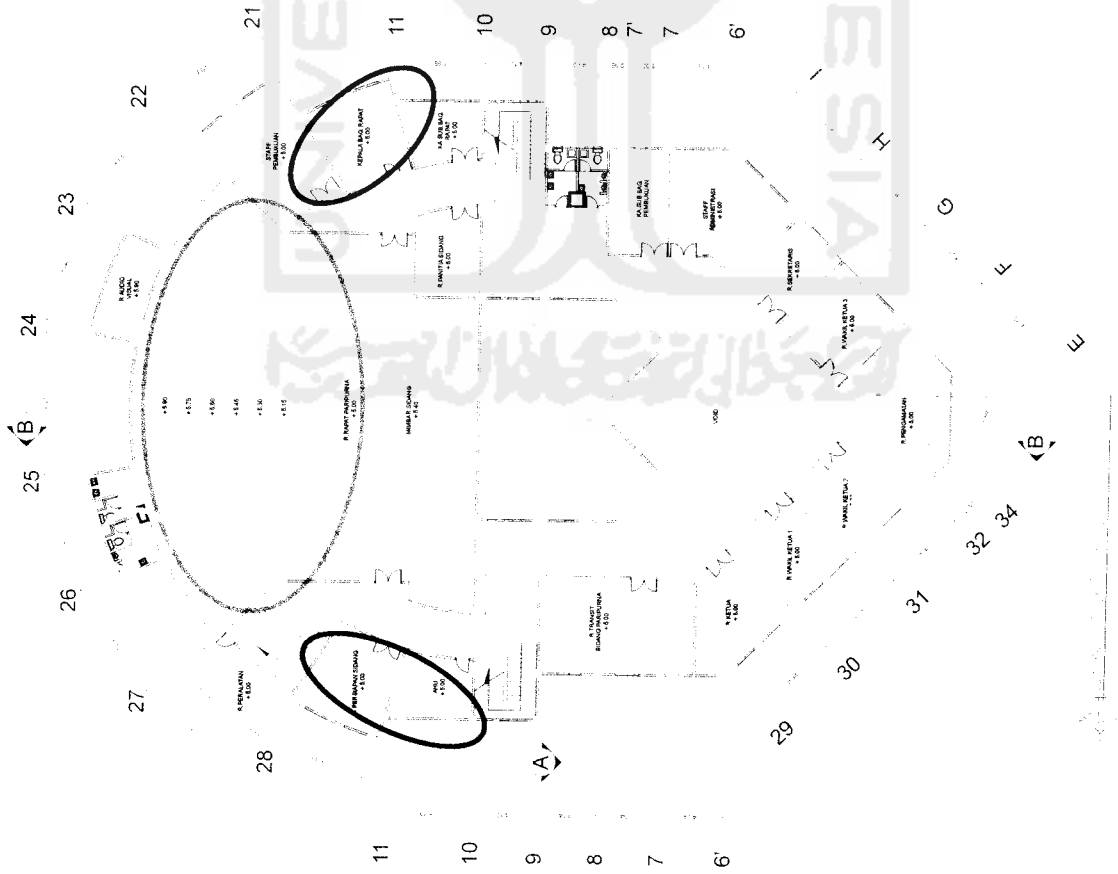


Pada lantai 1 ini juga tersedia sebuah perpustakaan dan ruang baca

DENAH LANTAI 2

Denah Lantai 2 terdiri dari :

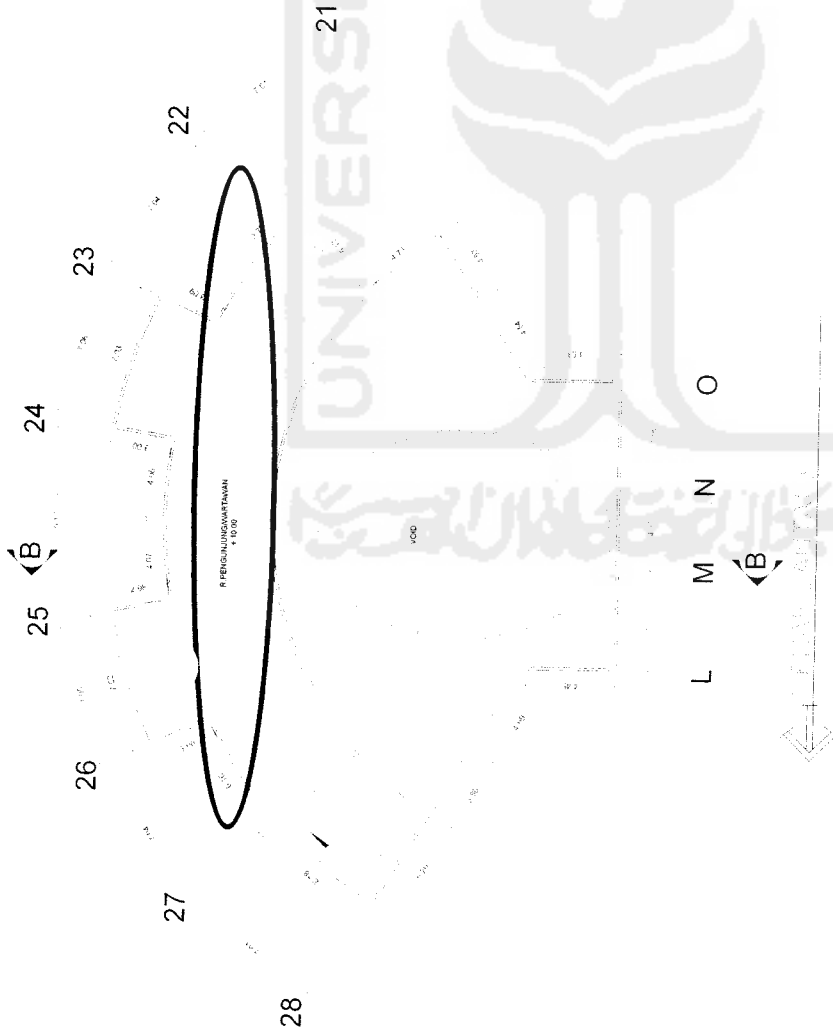
1. R. Ketua, Wakil Ketua
2. R. Sidang Paripurna
3. Pengelola
4. Service



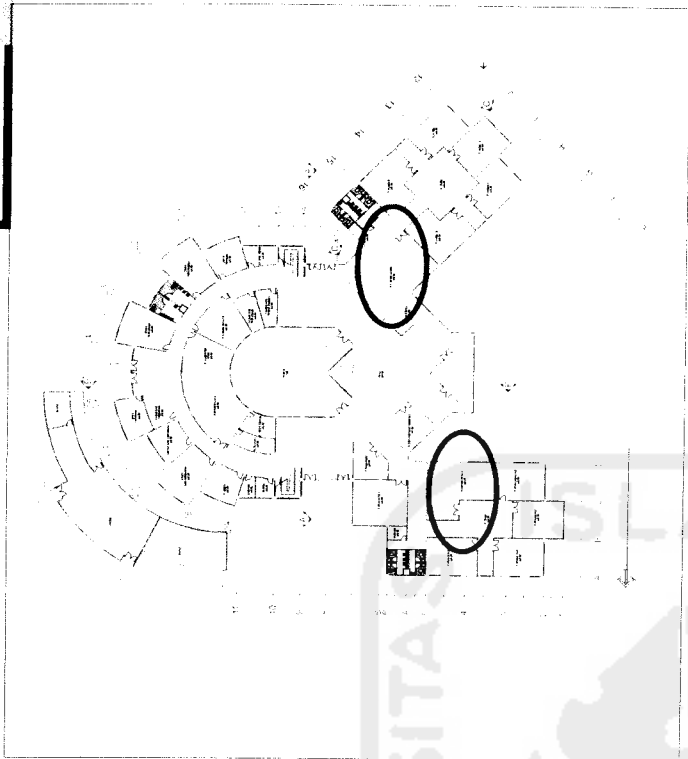
DENAH LANTAI 3

Denah Lantai 3 terdiri dari :

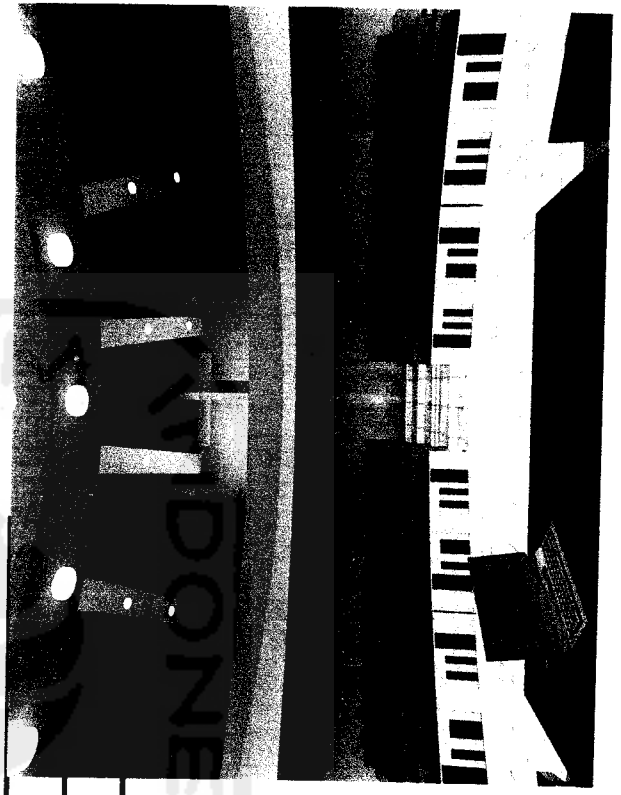
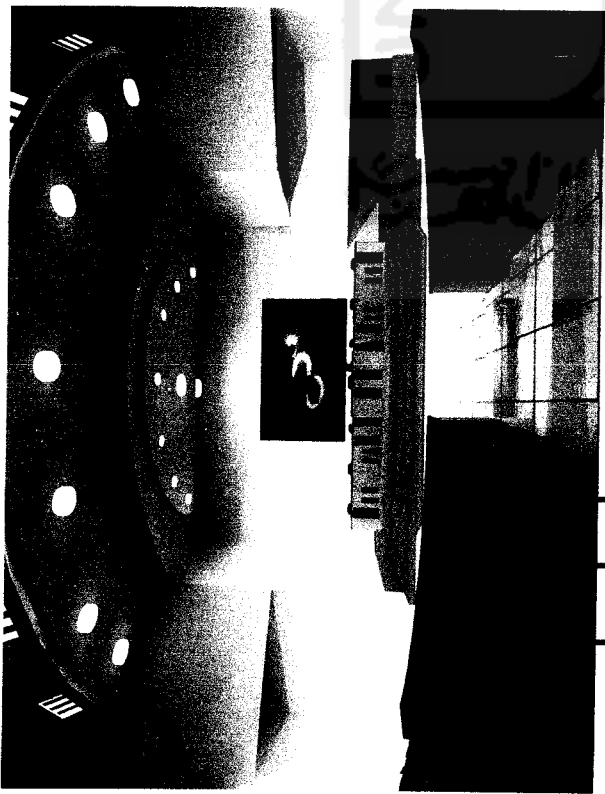
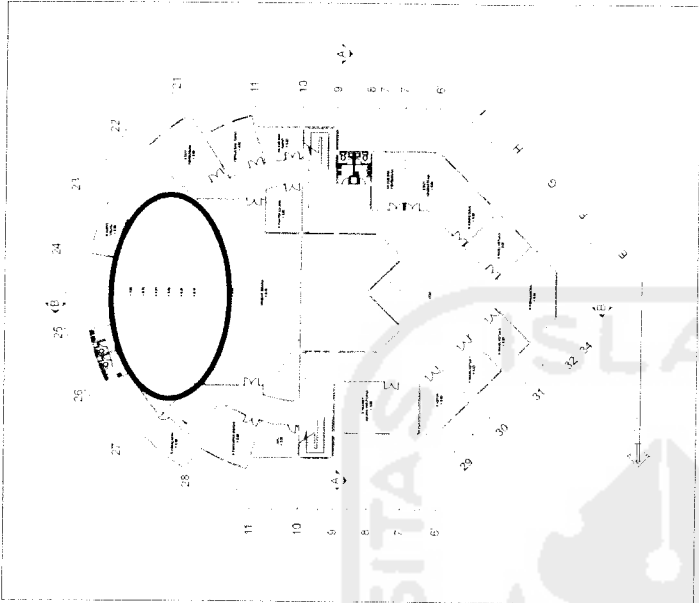
1. Pengunjung&wartawan
2. Void
3. Service



Pada lantai ini terdapat cuma terdapat area untung pengunjung dan wartawan, serta area service



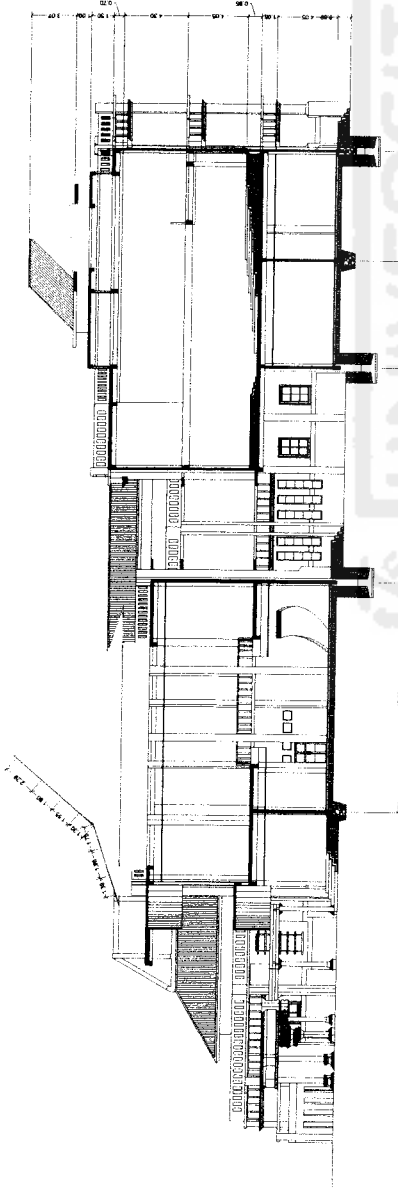
Suasana ruang sidang Komii dan Ruang sidang Fraksi



Suasana ruang sidang Paripurna

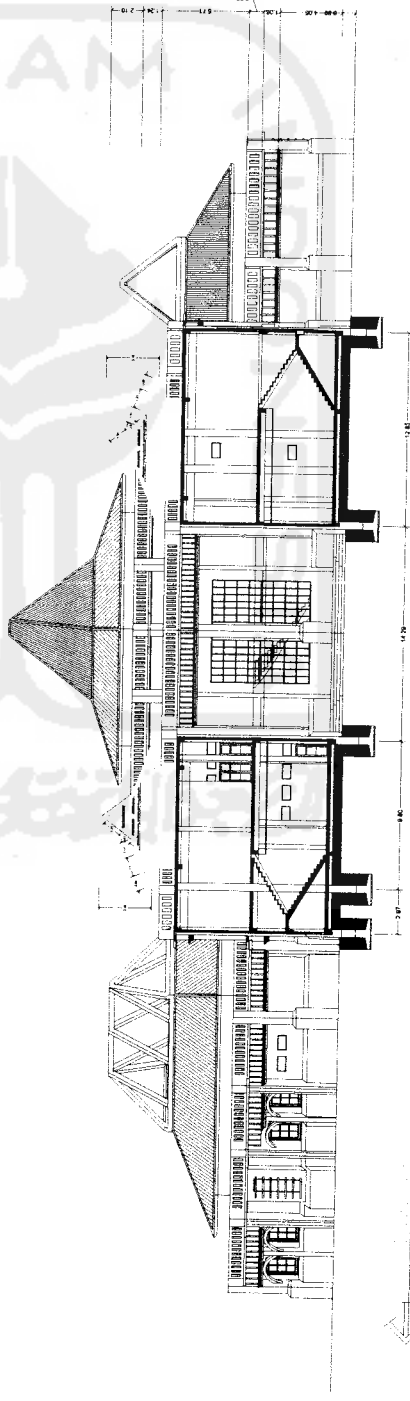


POTONGAN C - C



■ Struktur rangka merupakan struktur utama dari bangunan ini, berupa kerangka terdiri dari balok dan kolom sebagai rangkaian kesatuan.

POTONGAN A - A



■ Pondasi menggunakan footplate cukup untuk menyalurkan beban bangunan yang hanya 3 lantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Crosbie, Michael J. 2003. Architecture For The Books. The Images Publishing Group Pty Ltd. Australia.
- Jencks, Charles. 1991. The Language Of Post-Modern Architecture. Rizolli International Publication, Inc. United States of America.
- Neufert, Ernst. 1980. Architects' Data. Granada Publishing. New York.
- Frederik A. Jules, 1994. Dasar-Dasar Persersi unruk Perancangan Arsitektur.
- Budiarjo, Eko, 1987 percikan masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan.
- Bagoes Poernomo. W, 1993Pekembangan Gerakan Arsitektur Modern di Jerman dan Posmodern.
- Joseph deChaira, Standar Perencanaan Tapak, hal 97-100.
- Revianto B. Santoso – Omah 2000
- Survey Lokasi

K
KONDISI TAPAK

TAPAK MASUK BERURUTAN
 AREA PERKAWAHAN YG
 TERLEWAT DI JALAN KEM
 SUDHANTI YPM 1 SPACEM

V SEBERANG SITE TER
 BAKT ROMAN BELAIN

JALAN KEM SUDHANTI

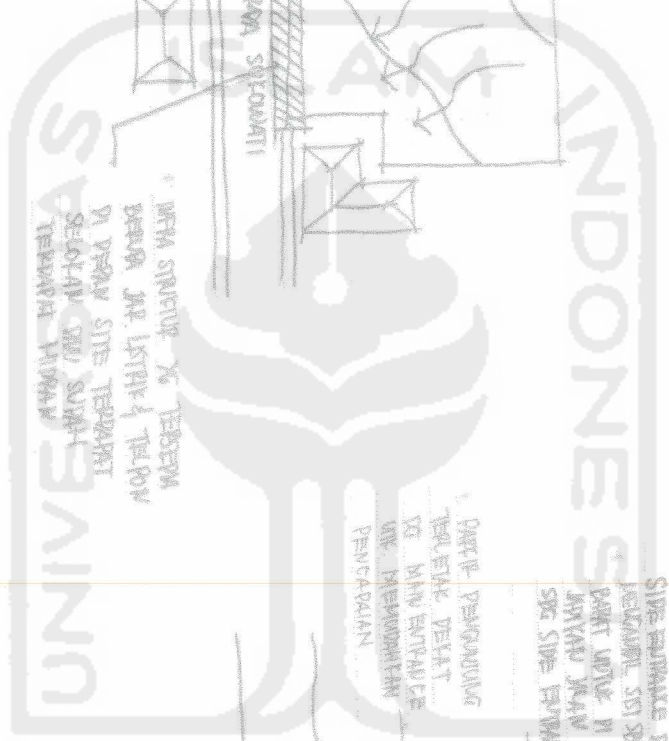
WTA STRUKTUR XG TERBENTUK
 DARI JAR LISTRIK & TALKON
 DI PERAW SITE TERBAKT
 SELATAN DAN SUKSES
 TERAWA HIDAM

1. PARTIR PENGUNJUNG
 TERLEWAT DEKAT
 XG MANU BAKTARU CE
 URE MEMORITAN
 PENGALAN

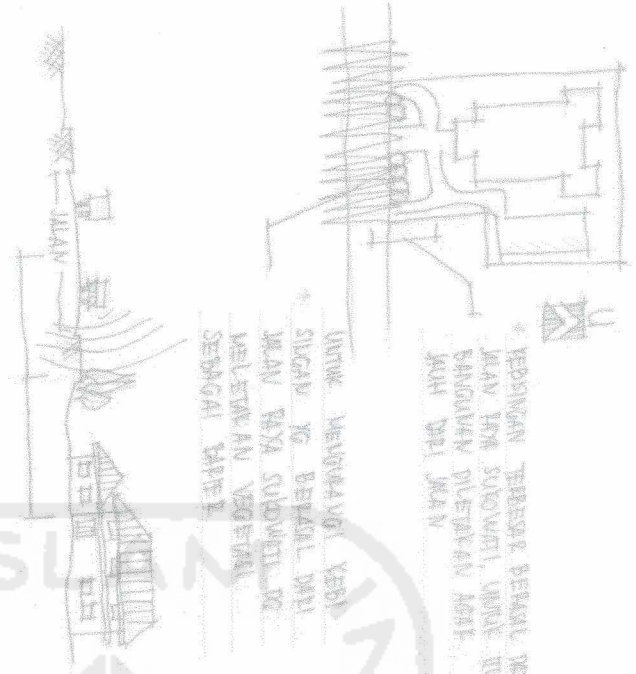
SIDE ENTRANCE XG
 JALANAN SGT SBN
 BAKT LUTER M
 ANYAKU KAW
 SGT SIDE ENTRANCE

S
SIPULASI

PARTIR AAGTO
 YAMAR, SEERE
 TART, YOPRANU



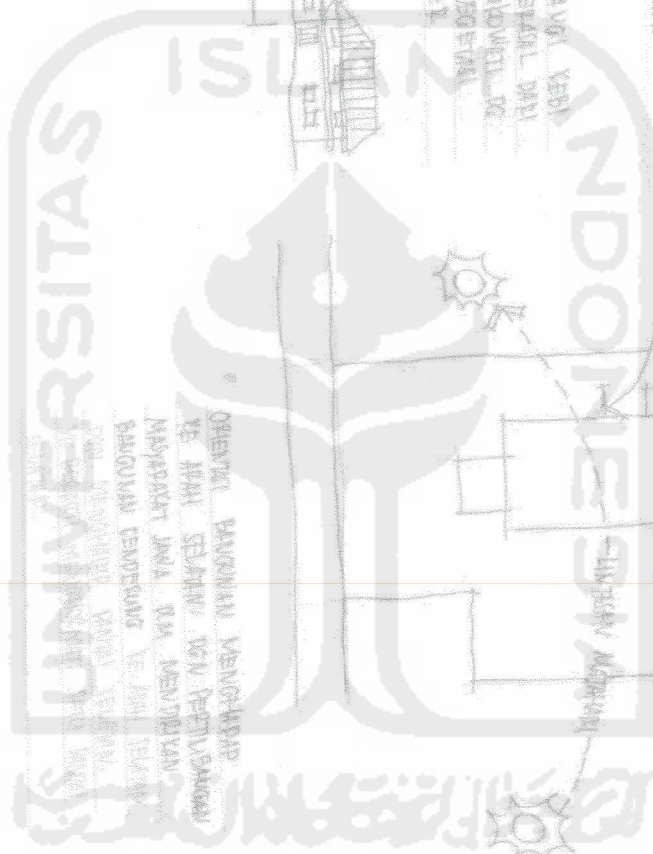
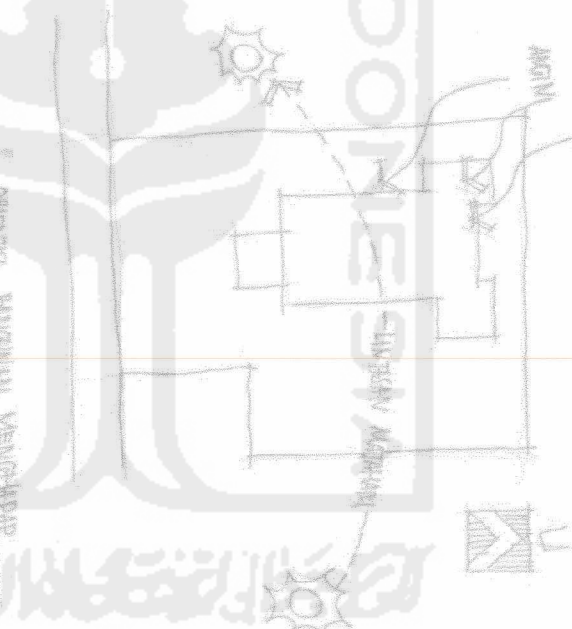
KEDIRYAGAAN



* BERSAMA SAMA BERKONSTRUKSI
 JALAN DAN SUKSES, UNTUK
 BANGUNAN DITERTAKAN ADALAH
 JALAN DARI JALAN

* UNTUK MEMERIKSA YEBI
 SIGAN YANG BERKAL DARI
 JALAN DAN SUKSES, DAN
 MELAKUKAN VERIFIKASI
 DENGAN YEBI

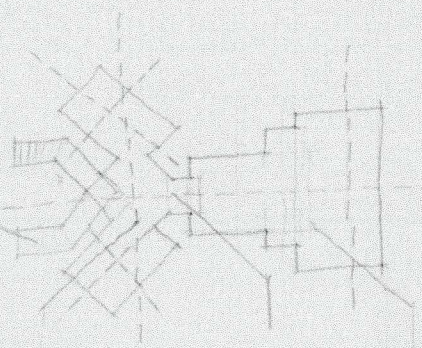
PERENCANAAN BANGUNAN



ORIENTASI BANGUNAN MENGENAI
 KE ARAH SELATAN DAN PERENCANAAN
 MEMPUNYAI JALAN DAN MENYEDIAKAN
 BANGUNAN KEMUDIAN YANG
 TERDAPAT DI BANGUNAN

14
B
 BENTUK DASAR

ALTERNATIF 1



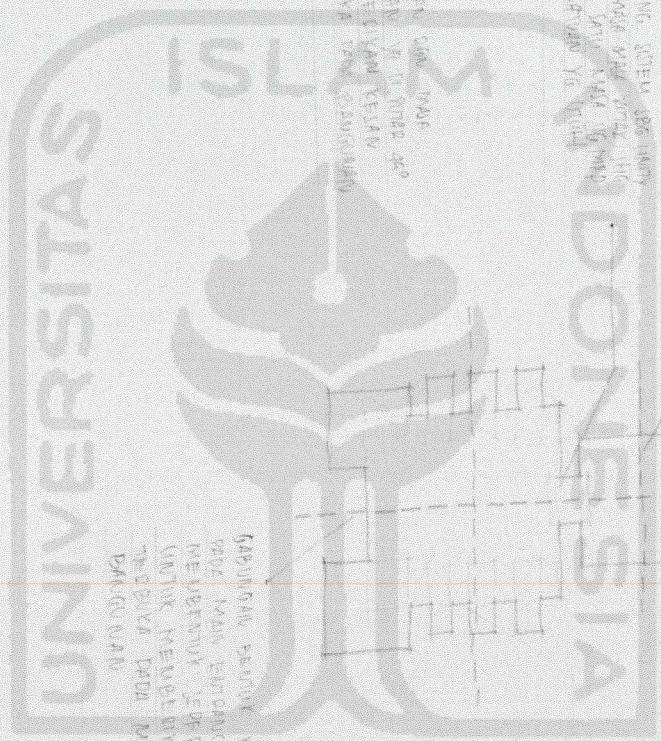
BENTUK RANGKA MAN FANADAN
 SEPERTI HUBUNYAN MELURUS
 KANTY YANG KETEPUSYAN
 M. DICTAKAN

Pemilihan tipe yang
 ini yang sebagai struktur yang
 tentu merupakan kean
 sosial yang sebagai

ALTERNATIF 2

PELOKAN DAN RANG
 YANG DITUNYAI DAN
 TERDOKA DAN SANGGAM

MENDUNG JENIS SPS HANY
 HINGGA MUDA YANG SUDAH
 TERDAN SUDAH SUDAH
 SUDAH SUDAH SUDAH



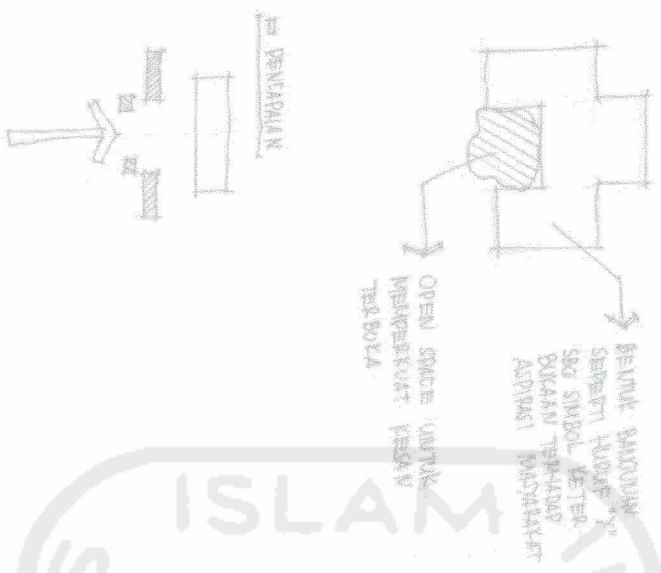
GABUNGAN SELOK KOTAK
 YANG KAN BERDASAR
 MELAKUKAN SUDAH SUDAH
 UNTUK MELAKUKAN SUDAH
 MELAKUKAN SUDAH SUDAH

PELOKAN DAN RANG
 YANG DITUNYAI DAN
 TERDOKA DAN SANGGAM

KONSEP BENTUK

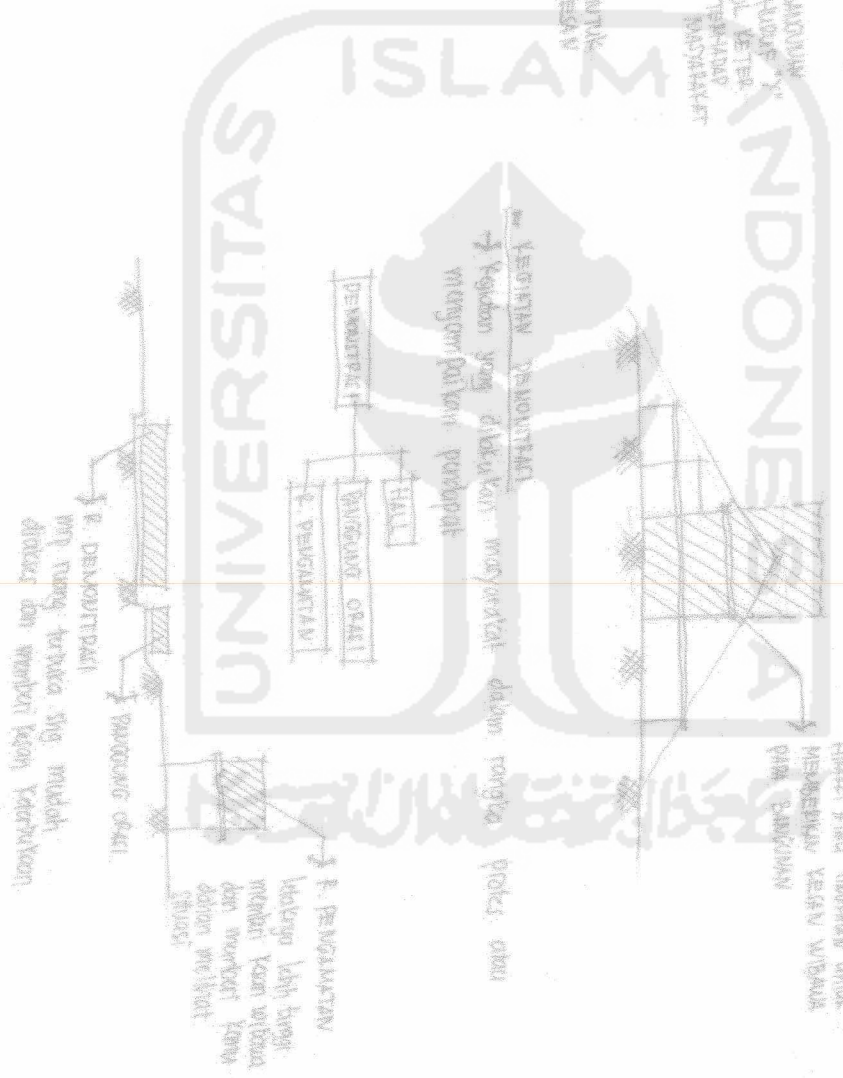
GEDUNG DPM

↳ sebagai lembaga yang mempunyai apresiasi dan masyarakat, tohukha terhadap masyarakat dari masyarakat



PENCAHAYAN SECARA LANGSUNG DARI TOKOR MEMUDRA MEMBERI SUDUT KEMAU KEMUDAHAN PERCAHAYAN KE BANGUNAN DAN KEMAU TERBUKA

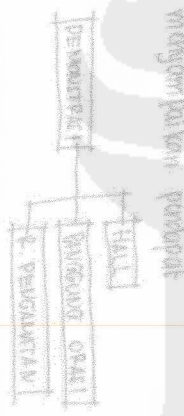
↳ merupakan lembaga pemerintahan yang menyanggah pembangunan



PENCAHAYAN SECARA LANGSUNG DARI TOKOR MEMUDRA MEMBERI SUDUT KEMAU KEMUDAHAN PERCAHAYAN KE BANGUNAN DAN KEMAU TERBUKA

↳ memiliki area terbuka untuk masyarakat kelas menengah

↳ YESTIYAN DEMOKRASI
↳ Gedung yang diberikan insentif dalam rangka proyek atau



↳ E. PENCAHAYAN
↳ Memberi lebih banyak memberi kesan vertikal dan menandai karna dengan melibat sinergi

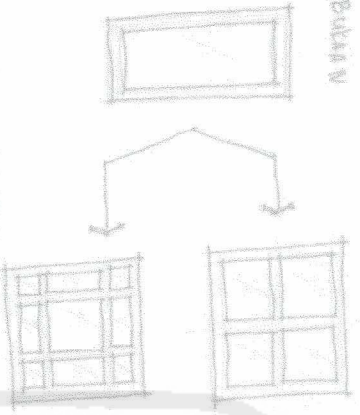
↳ E. DEMOKRASI
↳ yang sangat terbuka yang mudah diakses dan memberi kesan pemerintahan



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

o Arsitektur Post-Modern

o Bukit W



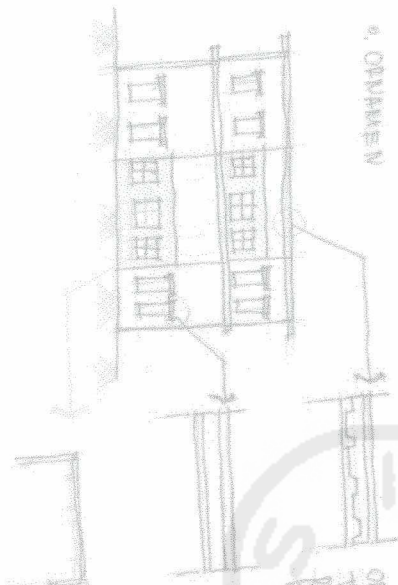
BUNDAH BERBENTUK Kotak - Kotak
MATERIAL DG. ELEM. BERBENTUK
MAY. MODERNISME. SBO. ORN. MSL
POST - MODERN

o ATAP



Atap yang ber bentuk modern
dan melambungkan ke langit
menjadi int. berapung
dengan bentuk yang ber
bentuk modern

o ORnamen



ORnamen seperti ukiran
yang ada pada bagian tengah
ditandai di bagian atas
dengan bentuk-bentuk
yang ada pada bagian
tengah

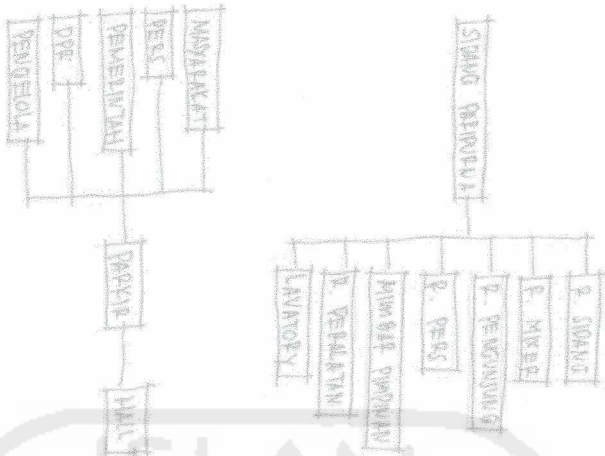
Di bagian bawah
ada ornamen yang
ada di bagian bawah
dan ada di bagian
tengah dan bagian
atas

Ornamen yang
ada di bagian atas
dan bagian bawah
dan bagian tengah
dan bagian bawah

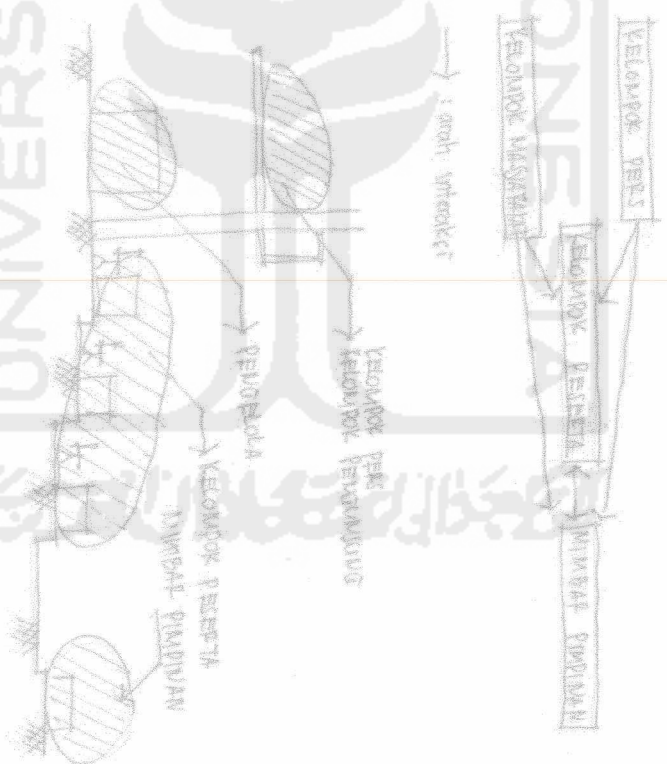
Ornamen yang
ada di bagian atas
dan bagian bawah
dan bagian tengah
dan bagian bawah

STAND PAKSI/REBUA

→ sidang legislatif dalam pemerintahan DPRD, komposisi perwakilan daerah, Pdtungjung jabatan Pakse, Sidang umum, pancekahan kasus daerah Abi



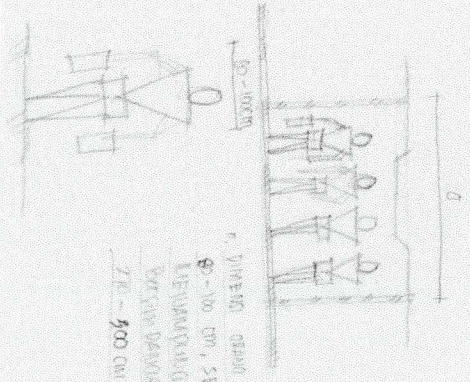
PELENGKAPAN POKOK 2 STAND PAKSI/REBUA BERDASARKAN PADA PEMBELAJARAN KEAGAMAAN



P
 KEMAH MUNG

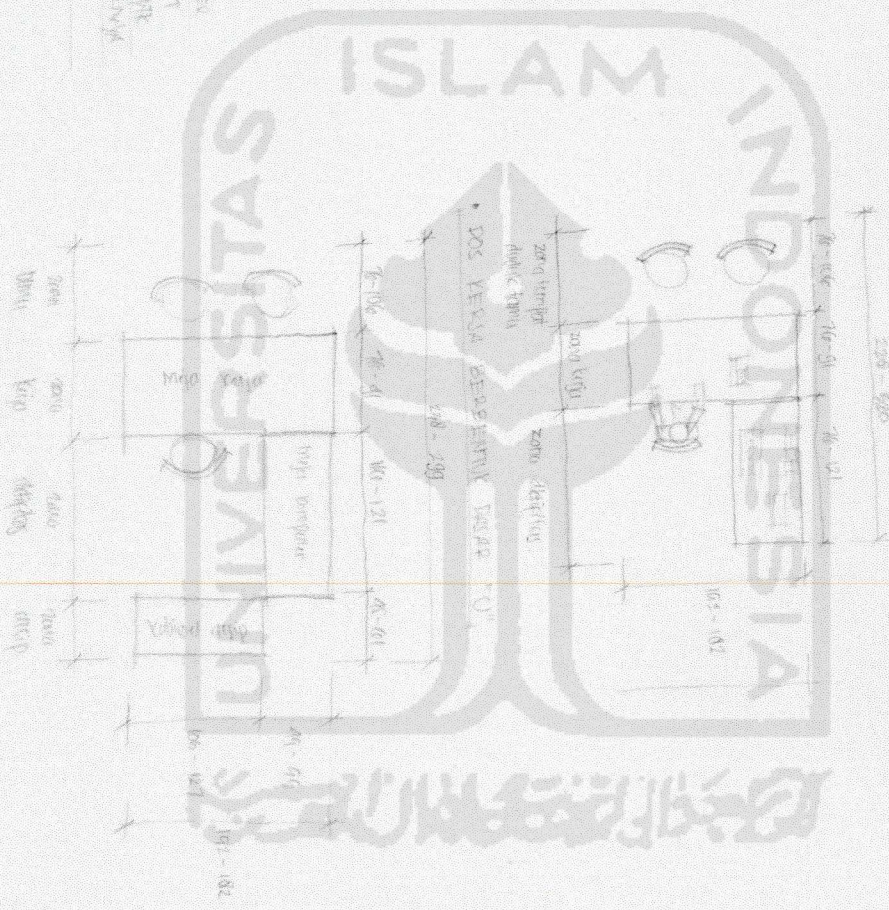
LOBBY

SEKELAS / KORIDOR

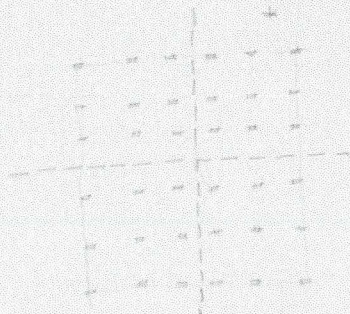


• DIVERSI DIBAGI MENJADI 2 KOTAK
 Ø = 100 CM, SELAIN 1 DILAKUKAN
 MENYUSUN 3 ORANG LAIN
 DENGAN DARI SAMA SAMA
 70 - 100 CM

• DOK VEVA DAN TERLET DI DOK TERLU

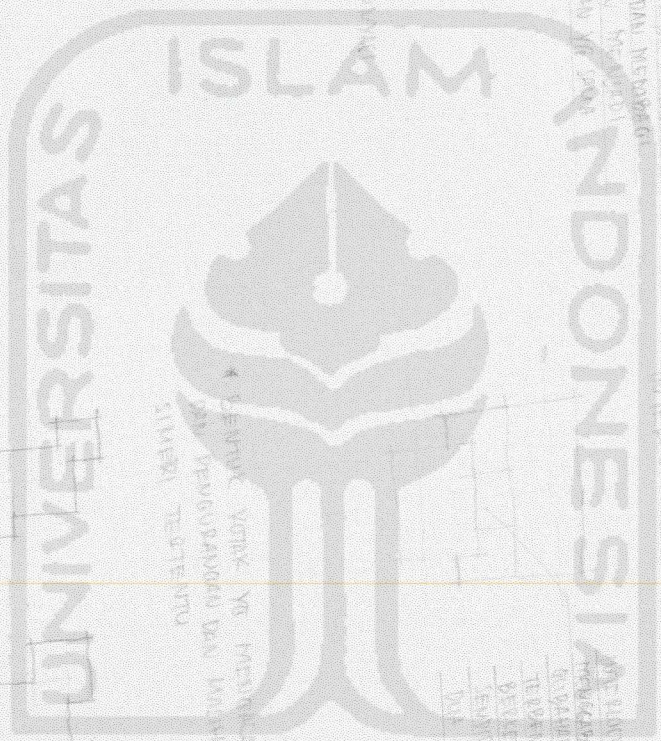
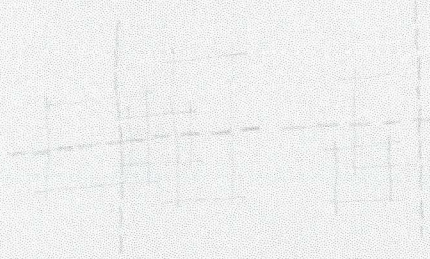


1
B
BENTUK RUMAH SANGGAMAH



BENTUK RUMAH SANGGAMAH
YANG MELIPUTI RUMAH SANGGAMAH
SANGGAMAH MELIPUTI
DUA RUMAH ATAU LEBIH

* BENTUK RUMAH SANGGAMAH YANG MELIPUTI RUMAH SANGGAMAH



* GAMBARAN BENTUK RUMAH SANGGAMAH
SANGGAMAH MELIPUTI RUMAH SANGGAMAH
DUA RUMAH ATAU LEBIH

* BENTUK RUMAH SANGGAMAH YANG MELIPUTI RUMAH SANGGAMAH
DUA RUMAH ATAU LEBIH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JALAN KH. HUSEIN SAIFUDDIN
NO. 150
DEPOK, JAWA BARAT
16515
T. 021-25343111
F. 021-25343112
WWW.II-INDONESIA.ID

